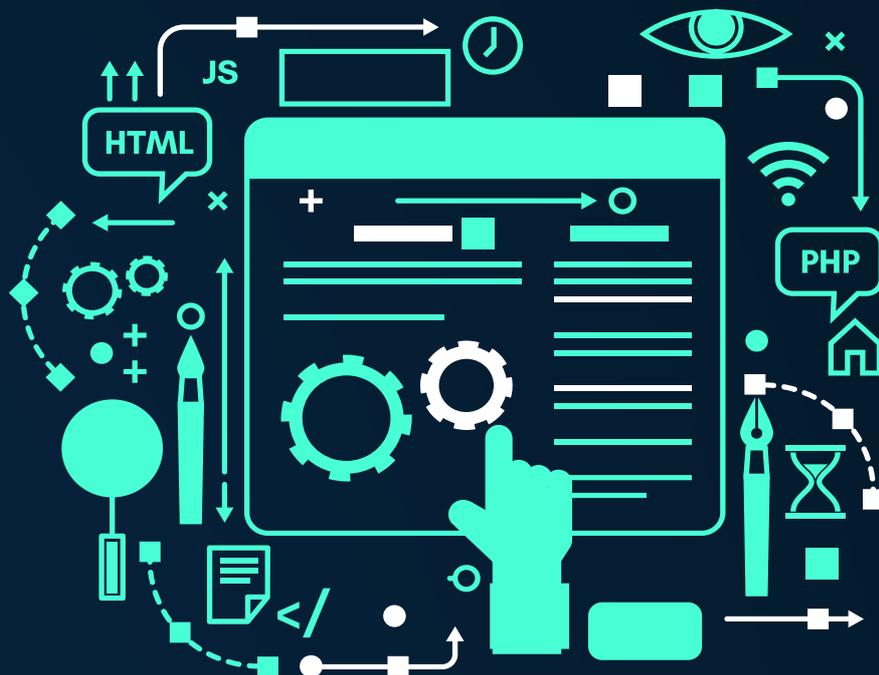


DRAFT



PANDUAN
INDEKS DAYA SAING DAERAH
2020



PENGANTAR

Kemenristek/BRIN melalui Direktorat Sistem Inovasi, Deputi Penguatan Inovasi telah menginisiasi penyusunan model pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD) yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional.

Memperhatikan betapa pentingnya daya saing, maka daya saing tersebut menjadi tiga prioritas penting dari sembilan visi, misi, dan program aksi Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan sebutan Nawacita. Tiga prioritas yang terkait dengan daya saing adalah (1) meningkatkan kualitas hidup manusia; (2) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Pengukuran IDSD diharapkan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

Besar harapan kami kegiatan ini dapat menstimulasi iklim kondusif penelitian dan pengembangan dan penguatan inovasi nasional, hingga pada akhirnya dapat berkontribusi pada penciptaan daya saing dan kemandirian bangsa Indonesia.

Jakarta Mei 2020

DEPUTI BIDANG PENGUATAN INOVASI
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BRIN

Dr. Ir. JUMA'IN APPE, MSi

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
2. DASAR HUKUM
3. TUJUAN, SASARAN DAN KEGUNAAN
4. METODE PENDEKATAN

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 LANDASAN TEORI
- 2.2 LANDASAN HUKUM
- 2.3 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB 3 METODOLOGI

- 3.1 Metode Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah
- 3.2 Metode Perhitungan Indeks Daya Saing Daerah

BAB 4 TEKNIS PENGISIAN KUESIONER

- 4.1 Proses Pengisian Indeks Daya Saing Daerah

BAB 5. ANALISIS DAN PEMBUATAN LAPORAN

- 5.1 Analisis Pemetaan IDSD
- 5.2 Pembuatan Laporan Pemetaan IDSD

BAB 6 Strategi Kebijakan Peningkatan Daya Saing

- 6.1 Strategi Kebijakan

BAB 7 PENUTUP

- 7.1 Kesimpulan

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model Sinergi Indeks Daya Saing Daerah dengan Indeks Lain

Gambar 3.2. Kerangka Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah

Gambar 4.1. Contoh Aplikasi Browser yang digunakan

Gambar 4.2. URL <http://indeks.inovasi.ristekbrin.go.id>

Gambar 4.3. Tampilan Awal <http://indeks.inovasi.ristekbrin.go.id>

Gambar 4.4. Tampilan Beranda Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Peta Indeks Daya Saing Daerah

Gambar 4.5. Tampilan Beranda Peta Persebaran Indeks Daya Saing Daerah

Gambar 4.6. Tampilan Beranda Tabulasi Persebaran Indeks Daya Saing Daerah

Gambar 4.7. Tampilan Graphical Persebaran Indeks Daya Saing Daerah

Gambar 4.8. Tampilan Kuadran Persebaran Indeks Daya Saing Daerah

Gambar 4.9. Kategori Indeks Daya Saing Daerah

Gambar 4.10. Nilai Indeks Daya Saing Daerah

Gambar 4.11. Detail Indeks Daya Saing Daerah

Gambar 4.12. Informasi Jadwal

Gambar 4.13. Informasi Panduan

Gambar 4.14. Detail Indeks Daya Saing Daerah

Gambar 4.15. Detail Indeks Daya Saing Daerah

Gambar 4.16. Tampilan Awal Login

Gambar 4.17. Tampilan User

Gambar 4.18. Tampilan Profil

Gambar 4.19. Tampilan Change Password

Gambar 4.20. Tampilan Menu Website

Gambar 4.21. Tampilan Menu Dashboard

Gambar 4.22. Tampilan Menu Kuesioner

Gambar 4.23. Tampilan Menu Pertanyaan Kuesioner

Gambar 4.24. Tampilan Pertanyaan Kuesioner

Gambar 4.25. Tampilan Pertanyaan Kuesioner

Gambar 4.26. Tampilan Upload Data Dukung

Gambar 4.27. Perbedaan Warna Pengisian Kuesioner

Gambar 4.28. Tampilan Priview Hasil Pengisian

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index (GCI)

Tabel 2.2 Peringkat Indonesia dalam The World Competitiveness Yearbook

Tabel 3.1. Rekapitulasi Komponen IDSD

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi ini, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Keadaan tersebut selanjutnya harus diartikan sebagai tuntutan bagi setiap daerah di Indonesia untuk meningkatkan daya saing masing-masing daerah, dimana tingginya daya saing antar daerah di Indonesia secara keseluruhan merupakan penentu bagi peningkatan daya saing nasional ditengah tingginya tuntutan untuk dapat bersaing secara global.

Situasi global yang terus berkembang ke arah keterbukaan pasar dan pengintegrasian perekonomian menuntut Indonesia terus menerus memperkuat daya saing dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki. Untuk itu, masyarakat Iptek yang terdiri dari lembaga litbang, Perguruan Tinggi, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan bidang Iptek mengharapkan peran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk meningkatkan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional dengan mewujudkan program-program nyata.

Indonesia mempunyai potensi yang lebih besar untuk menjadi negara maju karena mempunyai modal pembangunan yang siap untuk diolah. Sebagai negara kepulauan, kekayaan laut Indonesia yang luas merupakan modal pembangunan yang dapat didayagunakan. Biodiversitas tanaman, binatang yang hidup di hutan, serta biodiversitas laut dapat diolah menjadi bahan pangan, energi, dan obat-obatan. Sementara itu, Perguruan Tinggi, lemlitbang, dan industri menjadi pihak-pihak yang kompeten untuk mengolah dan memberikan nilai tambah pada produk-produk berbasis sumberdaya alam tersebut.

Kemenristek/BRIN melalui Direktorat Sistem Inovasi, Deputi Bidang Penguatan Inovasi telah menginisiasi penyusunan model pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD) yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pengukuran IDSD diharapkan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

Selain diperkuat oleh hasil kajian teoritik, model IDSD juga disusun dengan mempelajari model indeks yang sedang dikembangkan atau dikeluarkan oleh lembaga lain baik dalam maupun luar negeri seperti Indeks Inovasi Daerah (LAN); Indeks Government Award (Kemdagri); dan Indeks Pembangunan Manusia ; Global Competitiveness Index - World Economic Forum (GCI-WEF); Global Innovation Index (GII - Johnson Cornell University, WIPO dan Insead) dan Asian Competitiveness Indeks (ACI) yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia dan ketersediaan data sampai level provinsi dan kabupaten/kota. Indeks ini menggunakan 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumberdaya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi dengan 23 Dimensi dan 78 indikator (kuisioner).

IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pengukuran IDSD diharapkan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

2.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dari kegiatan ini antara lain:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- f. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015, tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019.
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

3.3 TUJUAN, SASARAN DAN KEGUNAAN

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) memiliki asas: kebebasan akademik, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, manfaat serta keberlanjutan. Dengan tujuan dari pengukuran Indeks Daya Saing daerah, antara lain adalah :

1. Mengukur pencapaian seluruh aktivitas di daerah dalam memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dengan mengoptimalkan ekosisten, potensi dan berbagai hasil iptek dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan
2. Menjadi pendorong kepada seluruh stakeholder terutama para pelaku inovasi (seluruh lembaga, daerah, dunia usaha dan masyarakat) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi dalam rangka meningkatkan tingkat daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
3. Sebagai upaya untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia;
4. Menjadikan dasar dalam perumusan, penetapan, evaluasi dan monitoring kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

5. Menjadi alat dalam proses harmonisasi berbagai kebijakan dan program pembangunan baik pada level nasional dan daerah

4.4 METODE PENDEKATAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan model pengukuran indeks daya saing di daerah adalah studi literatur, public hearing, Focussed Group Discussion, expert judgment, statistical analysis dan benchmarking terhadap model-model pengukuran indeks beserta komponen dan indikatornya. Disamping itu, agar model yang dihasilkan memiliki tingkat validitas yang tinggi, maka dilakukan validasi dan uji terap di beberapa daerah terpilih.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

Penelitian yang Telah Dilakukan

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh institusi baik nasional maupun internasional untuk mengetahui daya saing daerah atau negara, di antaranya:

- a) Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia bekerja sama dengan Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran (2007). Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran profil dan pemetaan daya saing ekonomi daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2005. Potret profil daya saing daerah menunjukkan posisi relatif suatu daerah terhadap daerah lainnya dengan memperhatikan semua faktor-faktor pembentuk daya saing yang dimilikinya serta seberapa jauh daerah tersebut dapat merealisasikan potensi dari faktor-faktor tersebut. Sedangkan pemetaan daya saing daerah dibagi ke dalam tiga pemetaan utama, yaitu:

- Pemetaan daya saing daerah secara keseluruhan,
- Pemetaan daya saing daerah berdasarkan indikator input, dan
- Pemetaan daya saing daerah berdasarkan output.

Semua hasil pemetaan disajikan dalam bentuk persentile peringkat daya saing daerah. Hasil utama dari penelitian tersebut adalah peringkat daya saing daerah dan neraca daya saing daerah untuk setiap kabupaten/kota di Indonesia. Hasil pemetaan daya saing daerah secara keseluruhan menempatkan 5 peringkat teratas daya saing daerah, yaitu Kota Bontang (Kalimantan Timur), Kab. Mimika (Papua), Kab. Kutai Timur (Kalimantan Timur), Kota Kediri (Jawa Timur) dan Kab. Siak (Riau).

- b) World Economic Forum (WEF) setiap tahunnya mempublikasikan Global Competitiveness Report yang menggambarkan secara menyeluruh kinerja ekonomi negara-negara di dunia. Selain itu WEF juga menyusun Global Competitiveness Index (GCI) sebagai tolok ukur kinerja makroekonomi dan mikroekonomi daya saing suatu negara. Global

Competitiveness Index memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang faktor-faktor yang dianggap penting dalam mendorong produktivitas dan daya saing negara. Faktor-faktor tersebut tidak dapat berdiri sendiri membentuk daya saing negara tetapi memiliki keterkaitan dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Kelemahan satu faktor akan berdampak negatif terhadap faktor lainnya. Misalnya kekuatan kemampuan berinovasi akan sulit dicapai tanpa adanya faktor kesehatan dan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang baik akan menyerap teknologi yang mutakhir. Meskipun faktor-faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang membentuk indeks daya saing negara, namun GCI tetap memberikan penilaian secara detail masing-masing faktor tersebut agar negara dapat mengetahui faktor mana yang masih perlu dikembangkan.

- c) Institute for Management Development (IMD) setiap tahunnya juga menerbitkan The World Competitiveness Yearbook yang menyajikan hasil pemeringkatan dan analisa atas kemampuan negara dalam menciptakan dan menjaga kemampuan daya saingnya. Penyusunan ranking dimulai dengan penghitungan standar nilai untuk setiap masing-masing kriteria seluruh negara. dengan menggunakan data-data yang tersedia baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Kemudian dibuat ranking negara berdasarkan agregasi kriteria yang terpilih. Kriteria yang tidak digunakan sebagai dasar penyusunan ranking, dijadikan sebagai informasi yang dapat menguatkan penilaian ranking. Pemeringkatan tidak hanya dibuat untuk peringkat negara, tetapi juga peringkat masing-masing kriteria. Misalnya, kriteria Produk Domestik Bruto, negara yang memiliki standar nilai tertinggi akan berada pada ranking pertama, sedangkan yang memiliki standar rendah berada pada ranking terbawah.
- d) European Commission mempublikasikan European Competitiveness Index (2013) tentang pemeringkatan daya saing yang mengukur, membandingkan dan meneliti daya saing bukan saja hanya antar negara, tetapi juga antar daerah di negara-negara Uni Eropa. Pemeringkatan didasarkan pada sebelas pilar yang menggambarkan faktor input dan output dari daya saing teritorial yang diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok utama pembentuk daya saing, yaitu: (1) Dasar; (2) Efisiensi; dan (3) Inovasi. Indikator-indikator yang digunakan untuk menyusun RCI dipilih dari Eurostat yang bersumber dari World Economic Forum, OECD-PISA and Regpat, the European Cluster Observatory, the World Bank Ease and Doing Business Index and Governance Indicator. Terdapat 73 indikator dari 80 indikator yang terpilih dari hasil uji statistik dengan menggunakan analisis multivariat. Kemudian skor dihitung dari masing-masing pilar berdasarkan rata-rata sederhana dari z-

score standar dan atau/ indikator yang ditransformasi. Sedangkan subindeks (3 kelompok utama, yaitu dasar, efisiensi dan inovasi) dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika dari skor pilarnya. Keseluruhan skor RCI dihitung dari agregasi tertimbang ketiga sub indeks tersebut berdasarkan pendekatan WEF-GCI.

- e) Analisis Daya Saing dan Strategi Pembangunan untuk 33 Provinsi Indonesia (Asia Competitiveness Institute), Pengukuran Indeks Daya Saing dan Strategi Pembangunan untuk 33 Provinsi Indonesia ini, dilakukan oleh Asia Competitiveness Institute di Lee Kuan Yee School of Public Policy, National University of Singapore. Kegiatan ini dilakukan selama 2 tahun dan dipublikasi pada tahun 2013 pada World Scientific Publishing. Metodologi yang digunakan ACI (Asia Competitiveness Index) untuk menyusun kerangka dan indikator penyusunan daya saing provinsi-provinsi di Indonesia tidak hanya sekedar membuat peringkat, tetapi juga melakukan simulasi kebijakan tentang bagaimana setiap provinsi dapat meningkatkan daya saingnya. Peringkat daya saing provinsi juga dipetakan pada peta Indonesia untuk mengidentifikasi beberapa tren secara geografis dan kesimpulan-kesimpulan regional. Berbagai indikator dan sublingkup kunci juga ditinjau lebih detail karena peran pentingnya dalam menentukan daya saing provinsi-provinsi di Indonesia. Pada dasarnya, cakupan daya saing ACI yang multidimensi ini memungkinkan hasil penelitian digunakan oleh pihak lain untuk menganalisis sektor-sektor yang lebih spesifik. Lebih lanjut, pendekatan pembangunan ekonomi regional seperti analisis provinsi-provinsi yang terletak dalam satu klaster juga disarankan untuk menghasilkan usulan-usulan kebijakan yang lebih strategis. Dari perspektif metodologi, ACI mendefinisikan daya saing sebagai dengan pendekatan yang komprehensif, memperhitungkan berbagai faktor yang besamasama membentuk kemampuan dari provinsi untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan inklusif, dalam periode waktu yang panjang.

Pengertian dan Konsep

Desentralisasi yang dilaksanakan di Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan geliat pertumbuhan ekonomi di daerah. Kondisi ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya melalui inovasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta menciptakan tata kelola ekonomi ke arah yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi. Pembentukan daya saing tentu tidak hanya mencakup upaya untuk memperkuat sinergi berbagai sektor pembangunan daerah, tetapi juga mencakup penyempurnaan secara struktural dalam sistem pembangunan daerah agar pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih efektif dan efisien.

Daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep dan definisi daya saing daerah yang dikembangkan dalam penelitian tersebut didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu: perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah dari penelitian-penelitian terdahulu.

World Economic Forum (WEF) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Institute for Management Development (IMD) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity, serta model ekonomi dan sosial.

European Commission mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, diiringi dengan kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, lebih umumnya adalah kemampuan (regions) untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi sementara terekspos pada daya saing eksternal.

Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan konsep comparative advantage, yakni dimilikinya unsur-unsur penunjang proses produksi yang memungkinkan satu negara menarik investor untuk melakukan investasi ke negaranya, tidak ke negara yang lain. Konotasi advantage di sini adalah situasi yang memungkinkan pemodal menuai keuntungan semaksimal

mungkin. Misalnya dengan menyediakan lahan murah, upah buruh murah, dan suplai bahan mentah produksi yang terjamin kontinuitasnya dengan harga yang lebih murah daripada harga yang ditawarkan oleh negara lain. Artinya, kekuatan modal dan keunggulan teknologi menjadi kunci penentu peningkatan daya saing (penjualan produk) satu negara.

Martin dan Tyler (2003)¹ menyebutkan argumen mengapa daerah maupun negara saling berkompetisi:

- untuk investasi, melalui kemampuan daerah untuk menarik masuknya modal asing, swasta dan modal publik;
- untuk tenaga kerja, dengan kemampuan untuk menarik masuknya tenaga kerja yang terampil, entrepreneur dan tenaga kerja yang kreatif, dengan cara menyediakan lingkungan yang kondusif dan pasar tenaga kerja domestik;
- untuk teknologi, melalui kemampuan daerah untuk menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari konsep dan definisi mengenai daya saing di atas, dapat dimaknai bahwa daya saing daerah dihasilkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor input, output dan outcome yang ada di daerah masing-masing, dengan faktor input sebagai faktor utama pembentuk daya saing daerah yaitu kemampuan daerah, yang selanjutnya akan menentukan kinerja output yang merupakan inti dari kinerja perekonomian. Inti dari kinerja perekonomian adalah upaya meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang berada di dalam perekonomian tersebut. Ukuran kesejahteraan memiliki makna yang sangat luas, indikatornya dapat berupa produktivitas tenaga kerja, PDRB per kapita atau tingkat kesempatan kerja.

Daya Saing Daerah

Sebuah negara atau sebuah region (Kabupaten/Provinsi) disebut kompetitif jika mengembangkan perusahaan beroperasi untuk berkompetisi dengan penuh keberhasilan dalam perekonomian global dan pada sisi lain mendukung peningkatan upah dan standar kehidupan pada penduduk secara umum. Daya saing tergantung pada produktivitas jangka panjang dimana bangsa atau region memberdayakan sumber daya manusia, modal dan sumber daya alamnya. Produktivitas diukur dari peningkatan upah berkesinambungan (sustainable wagers), pertumbuhan kesempatan kerja (job growth), dan standar hidup (standar

¹ Martin, R., Kitson, M., & Tyler, P. (Eds.). (2003). *Regional competitiveness*. Routledge.

of living). Daya saing mengandung makna seberapa produktifnya industri sebuah region berkompetisi dalam industri sejenis. Region berkompetisi dalam hal menawarkan sebuah lingkungan yang lebih produktif untuk dunia usaha.

Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasi dengan masalah produktifitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Meningkatnya produktifitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah input fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (Porter, 1990 dalam Abdullah, 2002)².

Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing dilihat dari beberapa indikator yaitu keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif, ada juga keunggulan absolut. Menurut Tarigan (2005:75)³. Keunggulan komperatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Lebih lanjut menurut tarigan (2005:75) istilah comparative advantage (keunggulan komparatif) mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo (1917). Dalam teori tersebut, Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara saling berdagang dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan yang komperatif maka kedua negara tersebut akan beruntung. Teryata ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting di perhatikan dalam ekonomi regional.

Keunggulan kompetitif adalah suatu keunggulan yang dapat diciptakan dan dikembangkan. Ini merupakan ukuran daya saing suatu aktifitas kemampuan suatu negara atau suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah atau luar negeri. Maka dari itu, menurut Tarigan (2005:75) seorang perencana wilayah harus memiliki kemampuan untuk menganalisa potensi ekonomi wilayahnya. Dalam hal ini kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor ini memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

² Abdullah, Petter. Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia. Yogyakarta: BPFE, 2002

³ Tarigan, S. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bumi Aksara.

Pengertian daya saing mulai berkembang setelah Porter (1990) mendefinisikan daya saing nasional: “luaran dari kemampuan suatu Negara untuk berinovasi dalam rangka mencapai, atau mempertahankan posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan Negara lain dalam sejumlah sector-sektor kuncinya.”. Secara eksplisit, Porter (1990) menyatakan bahwa konsep daya saing yang diterapkan pada level nasional tak lain adalah “produktivitas” yang didefinisikannya sebagai nilai output yang dihasilkan oleh tenaga kerja.

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI (PPSK BI) menggunakan definisi “daya saing daerah dalam penelitiannya sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan Internasional”.

Daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep dan definisi daya saing daerah yang dikembangkan dalam penelitian tersebut didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu: perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah dari penelitian-penelitian terdahulu.

World Economic Forum (WEF) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Institute for Management Development (IMD) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity, serta model ekonomi dan sosial.

European Commission mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, diiringi dengan kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, lebih umumnya adalah kemampuan (regions) untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi sementara terekspos pada daya saing eksternal.

Konsep daya saing daerah berkembang dari konsep daya saing yang digunakan untuk perusahaan dan negara. Selanjutnya konsep tersebut di kembangkan untuk tingkat negara sebagai daya saing global, khususnya melalui lembaga World Economic Forum (Global

Comvetitiveness Report) dan International Institute for Management Development (World Competitiveness Yearbook). Daya saing ekonomi suatu negara seringkali merupakan cerminan dari daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan. Disamping itu, dengan adanya tren desentralisasi, maka makin kuat kebutuhan untuk mengetahui daya saing pada tingkat daerah (PPSK BI, 2008).

Sedangkan untuk tingkat wilayah (region) konsep daya saing ekonomi dapat didefinisikan oleh Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UKDTI) yang menerbitkan “Regional Competitiveness Indicators”, serta Centre for Urban and Regional Studies (CURDS), Inggris, dengan publikasi “The Competitiveness Project: 1998 Regional Bench-marking Report”. Daya saing daerah menurut definisi yang dibuat UK-DTI ialah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Sedangkan pengertian konsep daya saing wilayah menurut CURDS ialah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.

Terdapat dua karakteristik yang umumnya dimiliki oleh daerah-daerah yang mempunyai daya saing tinggi. Pertama, daerah-daerah tersebut memiliki kondisi perekonomian yang baik. Kedua, adalah daerah-daerah dengan kondisi keamanan, politik, sosial dan budaya yang kondusif. Kondisi perekonomian daerah yang baik dan ditunjang oleh kondisi keamanan, politik, sosial budaya dan birokrasi yang ramah terhadap kegiatan usaha, akan menciptakan daya saing investasi daerah. Kondisi yang baik pada faktor-faktor tersebut akan semakin mempengaruhi daya saing investasi daerah jika didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang cukup dengan kualitas yang baik dan infrastruktur fisik pendukung kegiatan usaha yang memadai.

The European Commission mendefinisikan daya saing sebagai *“kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, diiringi dengan kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, lebih umumnya adalah kemampuan (regions) untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi sementara terekspos pada daya saing eksternal”* (European Commission, 1999 p.4. dalam PPSK-BI 2008).

Abdullah (2002) dalam penelitiannya mendefinisikan daya saing daerah “Kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.” Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan konsep comparative advantage, yakni dimilikinya unsur-unsur penunjang proses produksi yang memungkinkan satu negara menarik investor untuk melakukan investasi ke negaranya, tidak ke negara yang lain. Konotasi advantage di sini adalah situasi yang memungkinkan pemodal menuai keuntungan semaksimal mungkin. Misalnya dengan menyediakan lahan murah, upah buruh murah, dan suplai bahan mentah produksi yang terjamin kontinuitasnya dengan harga yang lebih murah daripada harga yang ditawarkan oleh negara lain. Artinya, kekuatan modal dan keunggulan teknologi menjadi kunci penentu peningkatan daya saing (penjualan produk) satu negara.

Konsep mengenai daya saing terdapat kesamaan esensi yang cukup jelas antara daya saing daerah dan daya saing nasional. Kesamaan pandangan tersebut adalah bahwa tujuan akhir dari upaya untuk meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian adalah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan (standart of living) dari masyarakat yang ada di dalam perekonomian tersebut. Sementara itu, konsep dan tujuan kesejahteraan memiliki makna yang sangat luas yang tidak hanya dapat diwakili oleh kinerja pertumbuhan ekonomi saja, tetapi oleh banyak indikator-indikator ekonomi dan non ekonomi yang mempengaruhinya. Sedangkan perbedaannya adalah terpusat pada wilayah, dimana daya saing daerah mencakup daerah (bagian dari suatu negara), sedangkan daya saing nasional mencakup negara. Dalam berbagai pembahasan tentang daya saing nasional pun, baik secara eksplisit maupun implisit, terangkum relevansi pengadopsian konsep daya saing nasional ke dalam konsep daya saing daerah.

Dari konsep dan definisi mengenai daya saing di atas, dapat dimaknai bahwa daya saing daerah dihasilkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor input, output dan outcome yang ada di daerah masing-masing, dengan faktor input sebagai faktor utama pembentuk daya saing daerah yaitu kemampuan daerah, yang selanjutnya akan menentukan kinerja output yang merupakan inti dari kinerja perekonomian. Inti dari kinerja perekonomian adalah upaya meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang berada di dalam perekonomian tersebut.

Faktor Pembentuk Daya Saing Daerah

Bank Indonesia dan Universitas Padjajaran⁴ dalam penelitiannya menetapkan factor-faktor pembentuk daya saing daerah yaitu:

1. Perekonomian daerah
2. Keterbukaan
3. Sistem Keuangan
4. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
5. Ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Sumber Daya Manusia
7. Institusi, tata pemerintahan dan kebijakan pemerintah
8. Manajemen ekonomi mikro.

Sedangkan WEF menyebutkan ada beberapa faktor penting yang membentuk daya saing nasional antara lain: (1) institusi; (2) Infrastruktur; (3) Kondisi Makroekonomi; (4) Pendidikan dasar dan kesehatan; (5) Pendidikan tinggi dan pelatihan; (6) Efisiensi pasar barang; (7) Efisiensi pasar tenaga kerja; (8) Pembangunan pasar keuangan; (9) Ketersediaan teknologi; (10) Luas pasar; (11) Kemudahan berusaha; (12) Inovasi.

Sementara itu, Institute for Management Development menilai kemampuan daya saing negara didasarkan pada 4 faktor utama, yaitu: (1) Kinerja perekonomian, terdiri dari 83 kriteria yang mencakup ekonomi domestik, perdagangan internasional, investasi internasional, tenaga kerja dan harga.; (2) Efisiensi pemerintah, terdiri dari 70 kriteria yang mencakup keuangan publik, kebijakan fiskal, kerangka kerja institusional, peraturan perundangan dunia usaha dan kerangka kerja masyarakat. ; (3) Efisiensi dunia usaha, terdiri dari 71 kriteria yang mencakup produktivitas dan efisiensi, pasar tenaga kerja, keuangan, praktek manajemen, perilaku dan nilai-nilai. ; dan (4) Infrastruktur, terdiri dari 114 kriteria yang mencakup infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, infrastruktur ilmu pengetahuan, kesehatan, lingkungan dan pendidikan. Dan European Commission memberikan penilaian daya saing daerah yang dirangkum dalam Regional Competitiveness Index (RCI) didasarkan pada 11 pilar, yaitu: (1) Institusi; (2) Stabilitas makroekonomi; (3) Infrastruktur; (4) Kesehatan; (5) Pendidikan dasar; (6) Pendidikan tinggi dan pendidikan seumur hidup; (7) Efisiensi pasar tenaga kerja; (8) Luas pasar; (9) Ketersediaan teknologi; (10) Kemudahan usaha; dan (11) Inovasi.

⁴ Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia dan Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. (2008). Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Kota di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Faktor Penguat Daya Saing Daerah

Tingginya daya saing daerah di Indonesia secara keseluruhan menjadi ujung tombak daya saing nasional, yang akan menjadi faktor terpenting untuk Indonesia dalam bersaing di tingkat global. Berdasarkan penilaian World Economic Forum (WEF), selama periode 2012 – 2019, peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index (GCI) terus mengalami peningkatan, meskipun posisi Indonesia masih berada di bawah posisi negara tetangga, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index (GCI)

No	Negara	Peringkat Dunia			
		2012 (144 negara)	2013 (148 negara)	2014 (144 negara)	2018 (140 negara)*
1	Singapura	2	2	2	2
2	Malaysia	25	24	20	25
3	Brunei Darussalam	28	26	Tidak dilakukan penilaian	62
4	Thailand	38	37	31	38
5	Indonesia	50	38	34	45
6	Vietnam	75	70	68	77

* <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/>

Menurut World Economic Index, terpuruknya daya saing disebabkan oleh beberapa faktor penting yang menonjol di antaranya:

- a) Tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro.
- b) Buruknya kualitas kelembagaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan.
- c) Lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas.
- d) Rendahnya efisiensi usaha pada tingkat operasional perusahaan.
- e) Lemahnya iklim persaingan usaha. Sementara itu, Institute for Management Development (IMD) juga menempatkan Indonesia jauh di bawah Singapura dan Malaysia dalam The World Competitiveness Yearbook yang diterbitkannya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Peringkat Indonesia dalam The World Competitiveness Yearbook

No	Negara	Peringkat Dunia				
		2012 (59 negara)	2013 (60 negara)	2014 (60 negara)	2018 (63 negara)*	2019 (63 negara)**
1	Singapura	4	5	3	3	2
2	Malaysia	14	15	12	24	22
5	Indonesia	42	39	37	42	32
* https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2018/						
** https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019/						

Menurut catatan Institute for Management Development (IMD) bahwa rendahnya kondisi daya saing Indonesia, disebabkan oleh buruknya kinerja perekonomian nasional dalam 4 (empat) hal pokok, yaitu:

- a) Buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam kinerjanya di perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan dan stabilitas harga.
- b) Buruknya efisiensi kelembagaan pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha kondusif, lemahnya koordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih dan kompleksitas struktur sosialnya.
- c) Lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggungjawab yang tercermin dari tingkat produktivitas yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional.
- d) Keterbatasan di dalam infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu komponen penting di dalam penguatan ekonomi domestik. Peningkatan perekonomian domestik, baik oleh daerah dan nasional akan menjadi modal utama untuk menjaga momentum pembangunan dan melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi untuk menuju ke arah transformasi ekonomi menjadi negara maju dan berdaya saing. Oleh sebab itu, peran daerah untuk meningkatkan daya saing daerahnya akan sangat bergantung kepada kemampuan daerah untuk melakukan identifikasi faktor penentu daya saing dan strategi untuk meningkatkan daya saingnya.

2.2 LANDASAN HUKUM

Peningkatan daya saing berbasis kinerja dan kreatifitas dalam berinovasi dalam lingkup nasional sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan maupun kebijakan di

berbagai kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait. Oleh karena itu diperlukan evaluasi dan analisis kebijakan berkenaan dengan peningkatan daya saing dan penguatan inovasi dalam peraturan perundangundangan terkait. Peraturan ini terutama terkait dengan peraturan perundangundangan di bidang ekonomi, perdagangan dan industri, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan, serta peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan infrastruktur sosial dan budaya.

Telaah dan evaluasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan produktivitas dan daya saing nasional merupakan perspektif masukan yang mendasari kebutuhan hukum dalam penyusunan kebijakan pengukuran indeks daya saing di daerah. Untuk itu, beberapa peraturan perundang-undangan yang terseleksi antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

pasal 34-38 tentang invensi dan inovasi, Kewajiban Pemerintah mengembangkan invensi dan inovasi, Pelindungan atas Kekayaan Intelektual dan pemanfaatannya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menggunakan hasil Invensi dan Inovasi nasional, Pemerintah Pusat wajib menjamin pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dalam bentuk Invensi dan Inovasi untuk pembangunan nasional. Badan Usaha yang menghasilkan Invensi dan Inovasi nasional dari pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberi insentif.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Pasal 4 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional.

3. UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 31 bagian Penataan Daerah ayat 2 menjelaskan Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah.

4. PP 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

Pasal 2 menjelaskan sasaran Inovasi Daerah dilaksanakan dengan tujuan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun sasaran inovatif untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) peningkatan Pelayanan Publik;
- b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c) peningkatan daya saing Daerah.

Dalam pelaksanaannya, sasaran inovatif didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut:

- a) peningkatan efisiensi; Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.
- b) perbaikan efektivitas; sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.
- c) perbaikan kualitas pelayanan; Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.
- d) tidak menimbulkan konflik kepentingan; inisiator tidak memitiki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.
- e) berorientasi kepada kepentingan umum; Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
- f) dilakukan secara terbuka; Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.
- g) memenuhi nilai kepatutan; Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.
- h) dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri; hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019

Peraturan tersebut disusun berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan 20 tahunan mendatang, memperhitungkan modal dasar bangsa Indonesia, dan amanat pembangunan dalam Pembukaan UUD 1945, visi pembangunan nasional 2005–2025 adalah: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk

dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
- b. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
- c. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
- d. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

- e. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
- f. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
- g. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
- h. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pementapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

2.3 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

Landasan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia terdiri atas landasan ideal yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945 yang telah mengalami 4 (empat) tahap amandemen. Sedangkan landasan operasional tidak dikenal lagi sejak GBHN dihapuskan dalam amandemen UUD 1945 akan tetapi untuk operasionalisasi dalam mencapai tujuan Negara mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sesuai dengan isi UU RI No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang tercantum dalam bab 2 pasal 3 adalah: RPJPN Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

Visi RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur. Selanjutnya Misi RPJPN 2005-2025 adalah: (1) Mewujudkan masyarakat berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (4) Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu; (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan; (6) Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari; (7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (8) Mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.⁵ Pokok-pokok sistem pemerintahan negara yang terdapat dalam bagian penjelasan UUD 1945 (pra amandemen), kini tidak diatur lagi secara spesifik (khusus). Untuk memahami pokok-pokok system pemerintahan Indonesia dapat dilihat dari pengalaman empiris dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pembangunan mencakup berbagai aspek kehidupan dalam berbangsa, yaitu seperti aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan secara

⁵ Undang Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

berencana, terarah, menyeluruh, terpadu serta berkelanjutan agar dapat memacu peningkatan untuk kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sederajat dengan bangsa lainnya yang lebih maju. Maka itu, sesungguhnya pembangunan nasional ialah pencerminan kehendak agar terus menerus meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Indonesia.

Munculnya globalisasi tentunya membawa dampak bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Dampak globalisasi tersebut meliputi dampak positif dan dampak negatif di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain- lainnya. Proses globalisasi yang bergulir, diiringi dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memungkinkan terjadinya perubahan lingkungan strategi yang berdampak luas terhadap eksistensi dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari aspek eksternal, globalisasi menimbulkan pertemuan antar budaya bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dengan kata lain, globalisasi berdampak pada terjadinya perubahan sosial besar-besaran yang belum tentu semua perubahan itu kongruen dengan kemajuan sosial (sosial progress). Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi, yakni pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi juga merasuk dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain sebagainya. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lainlain. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya. Selanjutnya yang harus di siapkan untuk menghadapi globalisasi adalah dengan memperkuat posisi Indonesia dari berbagai bidang, salah satu aspek yang harus diperkuat adalah daya saing nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis Kita mempunyai sumber daya alam yang berlimpah, sumberdaya manusia yang tangguh, yang terus dapat ditingkatkan keunggulan dan daya saingnya, serta hubungan yang baik dengan semua pihak baik dunia Barat, dunia Islam, negaranegara berkembang, emerging economies, dan lain-lain yang semuanya dapat menjadi mitra pembangunan Indonesia. Dengan demikian, ke depan, Indonesia mempunyai peluang emas

untuk memajukan kehidupan bangsa kita. Strategi yang kita tempuh untuk menjadi negara maju, developed country, adalah dengan memadukan pendekatan sumberdaya alam, iptek dan budaya, atau knowledgebased, resourcebased and culture-based development.

Indonesia dengan penduduknya yang lebih dari 250 juta jiwa dengan daya beli yang relatif baik merupakan pasar domestik yang sangat potensial bagi investor asing. Pasar domestik Indonesia akan menjadi sasaran empuk bagi investor asing jika Indonesia tidak mampu membangun daya saing yang kuat untuk menopang pembangunan ekonomi nasional. Makro ekonomi yang terpelihara stabilitasnya dan kapasitas pasar domestik yang terus membesar merupakan ekosistem yang positif untuk tumbuh-kembang inovasi dan daya saing. Peningkatan kapasitas pasar bermakna peningkatan permintaan masyarakat akan barang dan jasa, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Peningkatan permintaan barang dan jasa yang lebih banyak dan/atau lebih bermutu akan meningkatkan kebutuhan industri akan teknologi yang lebih sesuai. Dinamika ini membuka peluang dan tantangan bagi lembaga pengembang teknologi untuk melakukan riset yang relevan dengan kebutuhan industri.

Dalam perspektif global, tantangan Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan baik eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang dihadapi antara lain adalah tingkat persaingan perdagangan yang semakin ketat, semakin besarnya defisit neraca perdagangan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya, dan bagaimana Indonesia dapat meningkatkan daya tarik investasi. Sementara itu, tantangan internal Indonesia antara lain adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ASEAN Economy Community (AEC), ketidaksiapan daerah menghadapi AEC, tingkat pembangunan daerah yang masih sangat bervariasi dan kondisi SDM dan ketenagakerjaan Indonesia.

Disamping tantangan yang ada, Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk dapat mengambil manfaat dari implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia masih menjadi tujuan investasi pemodal dalam negeri ataupun luar negeri. Tingginya investasi tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar ini (bonus demografi) dapat menjadi kunci sukses bagi peningkatan daya saing Indonesia. Dengan dukungan peningkatan pendidikan dan

ketrampilan, maka produktivitas tenaga kerja akan meningkat. Peningkatan produktivitas tenaga kerja ini pada akhirnya mendorong peningkatan daya saing nasional.

Faktor produktivitas akan menjadi kunci bagaimana Indonesia dapat menghadapi MEA. Secara logika sederhana, produktivitas adalah kunci utama dalam persaingan. Dengan produktivitas yang tinggi diharapkan produksi menjadi lebih efisien dan dapat memberikan harga yang lebih kompetitif. Hanya saja, David Ricardo dapat mematahkan argumentasi ini (yang dibangun oleh Adam Smith) dengan konsep comparative advantage. Menurut Ricardo, keunggulan produktivitas bukanlah satu-satunya faktor sebuah negara dapat memenangkan persaingan tetapi faktor-faktor lain dapat pula menyebabkan sebuah negara dapat bersaing. Dengan kata lain, yang dapat menurunkan biaya produksi rata-rata tidak hanya produktivitas tetapi juga faktor biaya-biaya input yang rendah. Rendahnya biaya tenaga kerja merupakan faktor yang paling sering diandalkan oleh sebuah negara agar memiliki keunggulan komparatif. Di samping itu, faktor kepemilikan sumber daya alam maupun pasar finansial yang efisien juga merupakan faktor lain yang membawa pada keunggulan komparatif.

Untuk memenangkan persaingan, sebuah negara dapat mengandalkan keunggulan komparatif ataupun keunggulan kompetitif. Singapore dan Malaysia menjadi unggul daya saingnya karena keunggulan kompetitif, sedangkan Brunei Darussalam maupun Thailand menjadi unggul daya saingnya karena keunggulan komparatif. Untuk kasus Thailand, negara ini sudah mengarahkan strateginya menuju keunggulan kompetitif. Untuk negara Philipina, Vietnam, dan Kamboja masih mengandalkan keunggulan komparatif dalam strategi perdagangannya.

Untuk meningkatkan daya saing, industrialisasi harus dilakukan dalam segala bidang, hanya dengan industrialisasi, penerapan teknologi produksi yang lebih baik dapat dilakukan. Teknologi produksi adalah syarat utama untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Umumnya industrialisasi dilakukan oleh pemodal besar dengan kekuatan pendanaan dan kemampuan entrepreneurship yang mumpuni. Namun, menarik para pemodal besar untuk berinvestasi di Indonesia jelas tidak mudah. Banyak faktor eksternal dan internal yang harus dibenahi. Stabilitas politik, pungutan liar, penegakan hukum, infrastruktur, dan lain-lain. Mengundang investor asing harus terus dilakukan untuk menggali potensi ekonomi yang belum tersentuh dan membuka lapangan pekerjaan. Harus diakui, pemodal besar bisa mengubah warna ekonomi suatu daerah secara cepat dan instan. Namun, penguatan ekonomi kerakyatan juga wajib dilakukan Meskipun tidak bisa membawa perubahan secara drastis, tapi penguatan perekonomian bawah bisa meningkatkan ketahanan dan kemandirian ekonomi

Indonesia. Ekonomi rakyat umumnya bersifat padat karya. Dengan gelontoran dana yang sama, lapangan kerja yang tercipta lebih besar daripada industri padat modal. Penguatan dunia usaha rakyat juga akan meningkatkan daya beli yang akan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Permintaan ini jelas akan menjadi pasar potensial bagi investor. Investor akan lebih bergairah untuk menanam modal dan akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut. Namun, meningkatkan daya saing pada ekonomi rakyat jelas tidak mudah, masalah terbesar dalam upaya peningkatan daya saing pada level rakyat adalah minimnya akumulasi modal dan kurangnya pengetahuan. Berbeda dengan para pemodal besar yang cukup dengan satu kibasan maka teknologi terbaru pun siap digunakan, rakyat kecil dengan modal minim tentu kesulitan bersaing. Kurangnya pemahaman tentang konsep-konsep manajerial usaha juga bisa menghambat pembentukan bisnis yang sehat. Dan yang tidak kalah penting, pengetahuan mengenai penjualan dan pemasaran produk juga menjadi kendala.

Strategi terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan koperasi. Keberadaan koperasi dapat mempermudah koordinasi para pemilik usaha dengan karakteristik yang homogen. Mereka bisa menggabungkan modal untuk membeli peralatan yang diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah barang yang diproduksi, sesuatu yang sulit dilakukan bila mereka bergerak sendiri-sendiri. Salah satu bentuk kongkrit upaya Pemerintah RI dalam meningkatkan komitmennya dalam mendukung optimalisasi daya saing guna memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan terbitnya Inpres No. 6 Tahun 2014 pada 1 September 2014. Melalui Inpres tersebut, Presiden RI menginstruksikan kepada jajaran pemerintah di seluruh Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan daya saing nasional dan melakukan persiapan pelaksanaan MEA yang akan dimulai pada 2015. Diharapkan melalui Inpres tersebut peningkatan daya saing dapat terus ditingkatkan, utamanya dengan mengedepankan beberapa strategi dasar di antaranya:

- Pengembangan industri nasional yang berfokus pada pengembangan industri prioritas dalam rangka memenuhi pasar ASEAN; pengembangan industri dalam rangka mengamankan pasar dalam negeri. Selanjutnya, pengembangan industri kecil menengah; pengembangan SDM dan penelitian; dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Pengembangan pertanian, dengan fokus pada peningkatan investasi langsung di sektor pertanian, dan peningkatan akses pasar.

- Pengembangan kelautan dan perikanan, dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan posisi kelautan dan perikanan; penguatan daya saing kelautan dan perikanan; penguatan pasar dalam negeri; dan penguatan dan peningkatan pasar ekspor.
- Pengembangan energi, yang fokus pada pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan pengurangan penggunaan energi fosil (Bahan Bakar Minyak); sub sektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi; dan peningkatan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik.

Selain itu masih ada sepuluh sektor pengembangan lainnya, yang meliputi pengembangan infrastruktur; pengembangan sistem logistik nasional; pengembangan perbankan; investasi; usaha mikro, kecil, dan menengah; tenaga kerja; kesehatan; perdagangan; kepariwisataan; dan kewirausahaan. Kita patut bersyukur upaya untuk terus meningkatkan daya saing secara bertahap di Indonesia telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, meskipun harus diakui masih terdapat berbagai kekurangan yang menjadi tugas bersama untuk terus memperbaikinya.

3. Landasan Yuridis

Menurut Kelsen, efektivitas dari peraturan perundang-undangan harus dibedakan dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, karena efektivitas hukum merupakan fakta. Sedangkan Zevenbergen menyatakan, hukum berlaku secara yuridis, apabila kaidah hukum terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Logemann berpendapat, kaidah hukum mengikat, apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya. Syarat kedua adalah syarat sosiologis, yang menekankan pada efektivitas hukum yang akan dibuat. Menurut teori kekuasaan, hukum berlaku secara sosiologis karena adanya pemaksaan berlakunya oleh penguasa; terlepas apakah masyarakat menerima atau menolaknya. Hal itu diperkuat dengan teori pengakuan yang menyatakan bahwa berlakunya hukum ataupun peraturan perundang-undangan didasarkan atas penerimaan atau pengakuan atas peraturan tersebut. Syarat filosofis apabila peraturan perundang-undangan yang diterapkan sesuai dengan cita-cita hukum, atau sesuai dengan nilai positif yang tertinggi, misal cita-cita hukum bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, maka penyusunan peraturan perundang-undangan harus memenuhi ketiga syarat tersebut. Jika peraturan perundang-undangan hanya memenuhi syarat yuridis saja, maka kemungkinan regulasi yang dikeluarkan hanya merupakan kumpulan

norma yang absurd. Sama halnya apabila peraturan perundang-undangan hanya memenuhi aspek sosiologis saja, artinya lebih menonjolkan teori kekuasaan, maka peraturan perundangundangan yang dibuat cenderung menjadi klausul aturan-aturan pemaksa dan tidak efektif. Kemudian apabila peraturan tersebut hanya berlaku secara filosofis, maka peraturan tersebut hanya merupakan kumpulan cita-cita saja. Untuk itu, ketiga syarat tersebut mesti menjadi roh dalam pembentukan peraturan perundangundangan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyusunan peraturan perundang-undangan memperhatikan dua faktor, yang pertama adalah kondisi politik dan pengaturan hukum yang imperatif. Dimana kebijakan pemerintah berkaitan dengan arah dan jangkauan pengaturan hukum yang jelas dan mengikat. Kedua, adalah timbulnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, dimana konsepsi hukum dapat teraktualisasikan dalam diri manusia berkenaan dengan keselarasan, ketertiban dan ketenteraman atau kondisi yang sepantasnya diinginkan. Implementasi hukum yang tertib apabila terdapat keserasian antara politik hukum yang dibuat oleh pemerintah dengan kesadaran hukum masyarakat.

UU No. 18 Tahun 2002 merupakan tonggak penting, landasan hukum yang diharapkan dapat memperkuat landasan pembangunan dan mempercepat perkembangan iptek, mendorong pertumbuhan dan pendayagunaan sumberdaya iptek. UU No. 18 Tahun 2002 diharapkan dapat memperkuat jaringan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemajuan iptek.

Menurut Tatang (2005) meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sistem inovasi, namun sistem nasional litbangrap iptek merupakan keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur-unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek dalam satu keseluruhan yang utuh. Selanjutnya Tatang (2005) menyebutkan, esensi keterkaitan ini sama dengan atau setidaknya berangkat dari konsep sistem inovasi nasional, dan karenanya merupakan langkah penting bagi perkembangan sistem inovasi di Indonesia. Sistem nasional litbangrap iptek ini diperlukan untuk mencapai tujuan: a) memperkuat daya dukung iptek bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta b) meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional.

Oleh karena itu perkembangan sistem inovasi ini akan ditentukan oleh pelaksanaan lebih lanjut (secara legal) dan implementasinya. Salah satu pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2002 adalah

penguatan fungsi kelembagaan iptek dalam sistem nasional litbangrap iptek. Upaya ini dilakukan melalui: a) mengorganisasikan pembentukan sumber daya manusia, penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi; b) pembentukan iklim dan memberikan dukungan kebijakan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek.

Pemajuan ataupun penguatan sistem inovasi pada tataran daerah menurut Tatang (2005) adalah sesuatu yang penting bagi perkembangan sistem inovasi nasional dan peningkatan daya saing secara nasional. Penguatan sistem inovasi di tataran daerah merupakan bagian integral atau sub sistem dari pilar sistem inovasi nasional. Upaya-upaya terpadu dalam penguatan kelembagaan, interaksi dan proses pembelajaran akan menjadi semakin penting pada tataran daerah. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tanggung jawab daerah dalam pembangunan iptek dan sistem inovasi cukup besar. Hal ini juga ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain: a) tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (Pasal 2 ayat (3)); b) kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban antara lain: memajukan dan mengembangkan daya saing daerah (Pasal 27 ayat (1) butir g.) Keberadaan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa proses rekonstruksi peraturan perundang-undangan setidaknya memenuhi tiga syarat dasar, yaitu syarat dasar yuridis, dasar sosiologis, dan dasar filosofis. Sedangkan menurut Teori Sistem Hukum Stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (grundnorm) bentuknya tidak kongkrit (abstrak). Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.⁶

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu, diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau

oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum. Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.⁷

Dasar hukum (legal baseline) pembangunan dan penataan daerah telah diamanatkan di dalam UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara eksplisit disebutkan pada Bab VI Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

- 1) Dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan Daerah.
- 2) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; c) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; e) meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan f) memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Selanjutnya esensi pembangunan Daerah diamanatkan dalam Pasal 258 ayat (1), bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Informasi berkenaan dengan aspek daya saing daerah juga disebutkan dalam Pasal 392, bahwa Informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf a memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup: (a) kondisi geografis daerah; (b) demografi; (c) potensi sumber daya daerah; (d) ekonomi dan keuangan daerah; (e) aspek kesejahteraan masyarakat; (f) aspek pelayanan umum; dan (g) aspek daya saing Daerah.

⁷ Bagian Penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Untuk efektifitas dan inovasi pelayanan publik dimuat dalam Pasal 349 ayat (1), bahwa Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah.

BAB 3

METODOLOGI

3.1 Metode Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah

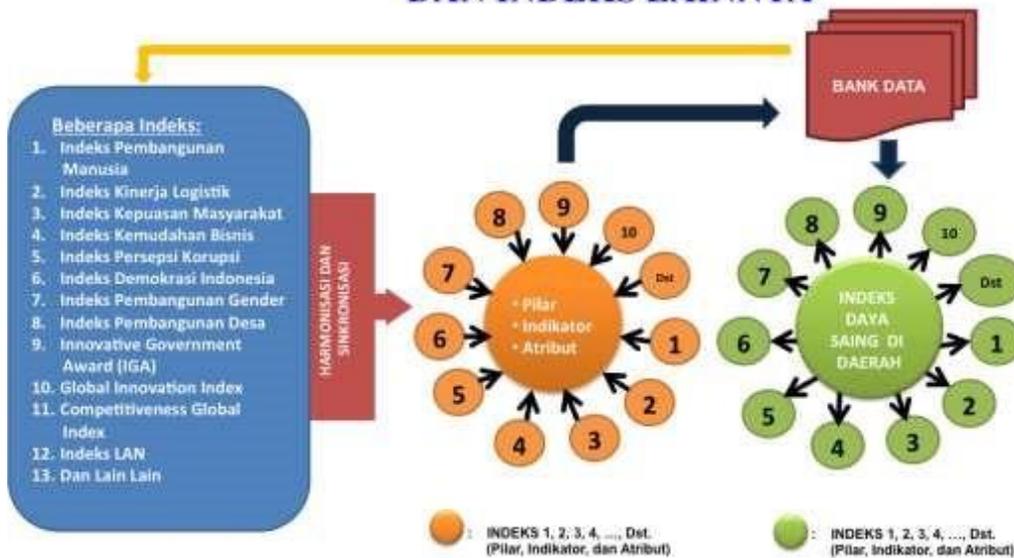
Melalui rangkaian aktivitas studi literatur dan Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mencoba menginisiasi penyusunan model indeks daya saing daerah dengan pendekatan yang lebih holistik. Secara teoritik, konfigurasi komponen indeks dibangun dari hasil penyesuaian dan pengembangan model indeks yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga yang berkompeten, misalnya: Indeks Inovasi Daerah dari Lembaga Administrasi Negara (LAN); Indeks Inovasi Daerah berdasarkan Perber Menristek dan Mendagri; Indeks Government Award dari Kementerian Dalam Negeri; dan Indeks Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Secara umum, ruang lingkup pekerjaan penyusunan indeks daya saing di daerah meliputi enam komponen: (1) Penentuan Pilar, Indikator dan Atribut Indeks Daya Saing Daerah, (2) Penyusunan Kuesioner, (3) Perhitungan Indeks Daya Saing Daerah, (4) Penyusunan Regulasi (Naskah Urgensi, RPerpres, dan Panduan Pengukuran Indeks), (5) Penyusunan *Database*, dan (6) Disain Program Aplikasi dan Sistem Informasi Indeks Daya Saing Daerah berbasis *online*.

Tujuan Penyatuan Indeks

Tujuan penyatuan dan penyesuaian komponen utama (pilar), indikator dan atribut dalam satu indeks daya saing daerah agar terjadi penyamaan visi dan persepsi antarkementerian dan lembaga dalam menyusun kebijakan nasional yang komprehensif dan saling bersinergi. Untuk itu, diperlukan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pelaksanaan pengukuran indeks daya saing daerah yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, (lihat Gambar 3.1).

MODEL SINERGI INDEKS DAYA SAING DAERAH DAN INDEKS LAINNYA



Gambar 3.1 Model Sinergi Indeks Daya Saing Daerah dengan Indeks Lain

3.2 Metode Perhitungan Indeks Daya Saing Daerah

Indeks umumnya dibangun dengan menggunakan beberapa komponen atau variabel Komposit .Dengan demikian, isu utama dalam penyusunan Indeks dengan menggunakan berbagai komponen adalah:

- Mencari atau menentukan variabel-variabel beserta indikator-indikator penyusunnya yang tepat
- Menentukan bobot dari setiap komponen-komponen penyusun indeks.
- Menentukan metode untuk mengagregasi komponen-komponen penyusunan indeks menjadi suatu indeks komposit.

Idealnya indeks disusun dengan menggunakan indikator-indikator penyusun yang memiliki tipe data yang sama, namun dalam beberapa kasus dimungkinkan juga penyusunan indeks di lakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang memiliki tipe pengukuran berbeda (Kategorik: Nominal/Ordinal dan Numerik: Interval /Rasio). Metode penyusunan angka indeks tidaklah tunggal, melainkan menyesuaikan dengan “konteks” indeks yang akan dibangun serta tipe data dari indikator-indikator penyusunannya.

Metodologi dan pendekatan teori yang digunakan dalam penyusunan model pengukuran indeks daya saing di daerah dilakukan melalui: (1) Studi Literatur (*desk study*), (2) Diskusi Publik (*Public Hearing*), (3) Diskusi Kelompok Terfokus (*Focussed Group Discussion*), (4)

Pendapat Ahli (*Expert Judgment*), dan (5) Penyesuaian dan Perbandingan (*benchmarking*) terhadap model-model pengukuran indeks beserta komponen dan indikatornya yang telah disusun dan dirilis oleh berbagai *stakeholders* yang kompeten.

Kerangka Penyusunan Indeks

Penyusunan Indeks ditujukan untuk dapat memberikan perbandingan suatu “indikator”, baik antar waktu maupun antar entitas. Dengan demikian, salah satu manfaat penyusunan indeks adalah untuk mengevaluasi proses pembangunan yang sudah dan sedang berjalan bahkan dapat digunakan untuk memprediksi kemajuan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Referensi dari *benchmark* dengan penyesuaian tertentu dapat membantu perumusan indikator-indikator untuk mengukur setiap komponen utama. Adapun kerangka penyusunan indeks antara lain :

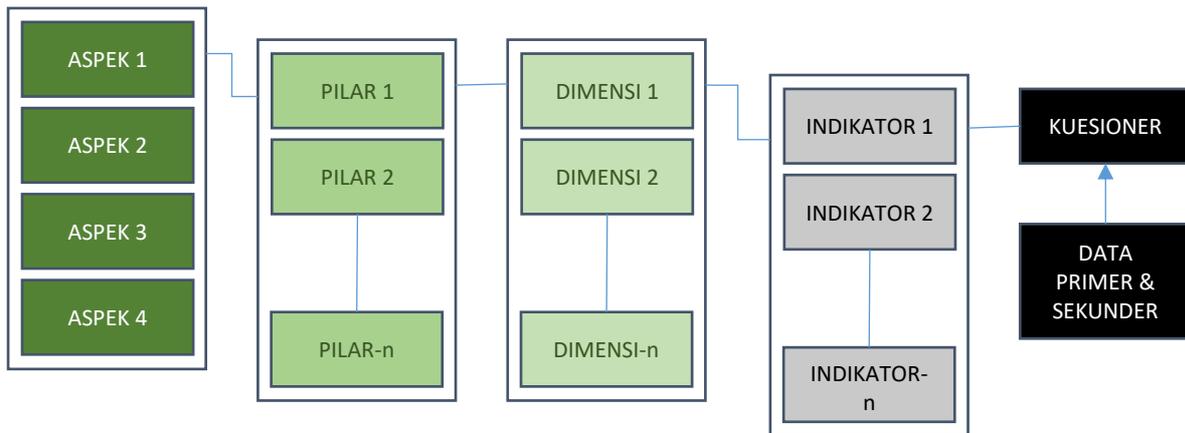
1. Menentukan komponen-komponen (atau aspek) utama pembentuk Indeks.
2. Menentukan indikator-indikator pembentuk setiap komponen dimensi.
3. Menentukan pilar pembentuk setiap komponen aspek.
4. Karena umumnya indeks diukur dengan menggunakan skala numerik, maka pengukuran setiap komponen utama beserta indikator-indikator pembentuknya juga umumnya diukur dengan menggunakan skala numerik.
5. Jika indikator setiap dimensi telah dirumuskan dan indikator pengukurannya telah tersedia, tahap selanjutnya adalah:
 - Bagaimana melakukan agregasi dari seluruh indikator menjadi suatu dimensi pembentuk komponen utama?

$$X_i = f(w_1, w_2, \dots, w_n)$$
 - Bagaimana melakukan agregasi dari seluruh dimensi menjadi suatu komponen pilar?

$$Y_i = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$
 - Bagaimana melakukan agregasi dari seluruh pilar menjadi komponen Aspek?

$$Z_j = f(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$$
 - Bagaimana melakukan agregasi dari seluruh Aspek menjadi Indeks komposit?

$$I = f(Z_1, Z_2, \dots, Z_k)$$



Gambar 3.2. Kerangka Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah

Kuesioner dalam bentuk Database Aplikasi Indeks Daya Saing Daerah terbagi atas 2 (dua) jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan instansi Pemerintah Daerah (Bappeda, Disdagin, balitbangda, dan BKPM); Perguruan Tinggi, Dunia Usaha (Kadin) dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang dan LPPM); sedangkan data sekunder merupakan data statistika yang telah dipublikasi oleh Pemerintah Daerah maupun Kementerian/Lembaga.

Komponen IDSD terdiri dari 4 Aspek, 12 Pilar, dan 23 Dimensi, 78 indikator. Komponen terbanyak terletak pada aspek ekosistem inovasi. Komposisi ini dihasilkan berdasarkan berbagai studi literature dan masukan para pakar (expert judgement). Ini juga menunjukkan bahwa aspek ekosistem inovasi diyakini menjadi aspek yang akan sangat berpengaruh kepada tingkat daya saing suatu wilayah. Pengisian kuesioner Indeks Daya Saing Daerah melalui aplikasi database Indeks Daya Saing Daerah, terdiri dari 78 pertanyaan terdiri dari pertanyaan dengan jawaban berbentuk data primer.

Tabel 3.1. Rekapitulasi Komponen IDSD

NO	ASPEK/FAKTOR	PILAR	DIMENSI	INDIKATOR
I	Aspek Faktor Penguat/Enabling Environment	Pilar Kelembagaan	Tata Kelola Pemerintahan	4
			Keamanan dan Ketertiban	1
		Pilar Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi	2
			Infrastruktur Air Bersih dan Kelistrikan	2
		Pilar Perekonomian Daerah	Keuangan Daerah	5
	Stabilitas Ekonomi	4		
II	Aspek Sumber Daya Manusia/Human Capital	Pilar Kesehatan	Kesehatan	1
		Pilar Pendidikan dan Keterampilan	Pendidikan	6
			Keterampilan	3
III	Aspek Pasar/Market	Pilar Efisiensi Pasar Produk	Kompetisi Dalam Negeri	2
			Pajak dan Retribusi	3
			Stabilitas Pasar	1
		Pilar Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	2
			Kapasitas tenaga kerja	3
		Pilar Akses Keuangan	Akses Keuangan	6
		Pilar Ukuran Pasar	Ukuran Pasar	3
		IV	Aspek Ekosistem Inovasi	Pilar Dinamika Bisnis
Kewirausahaan	5			
Pilar Kapasitas Inovasi	Interaksi dan Keberagaman			6
	Penelitian dan Pengembangan (R & D)			9
Pilar Kesiapan Teknologi	Komersialisasi			3
	Telematika			2
	Teknologi			1

Metode perhitungan indeks Daya Saing Daerah sebagai berikut :

Angka Indeks merupakan agregat dari seluruh variabel yang digunakan. Karena variabel mempunyai strata, maka perhitungan dilakukan sebagai berikut.

1. Dimensi merupakan rata-rata dari Indikator, dihitung dengan persamaan

$$Dimensi = \frac{\sum_{i=1}^n Indikator_i}{n}$$

2. Pilar merupakan rata-rata dari Dimensi

$$Pilar = \frac{\sum_{i=1}^n Dimensi_i}{n}$$

3. Aspek merupakan rata-rata dari Dimensi

$$Aspek = \frac{\sum_{i=1}^n Pilar_i}{n}$$

4. Indeks merupakan rata-rata dari Aspek

$$Indeks = \frac{\sum_{i=1}^n Aspek_i}{n}$$

Perhitungan Indeks ini dilakukan pada seluruh Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.

BAB 4

TEKNIS PENGISIAN KUESIONER

4.1 Proses Pengisian Indeks Daya Saing Daerah

Proses Pengisian Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2020 adalah dengan menggunakan aplikasi sistem informasi berbasis web base, dengan domain yang dapat di akses oleh pemerintah baik provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pengembangan Aplikasi Indeks Daya Saing Daerah diharapkan dapat:

1. Mempermudah Pemerintah Daerah dalam pengisian kuesioner Indeks Daya Saing Daerah
2. Mempercepat proses transfer informasi antara Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam hal-hal yang menyangkut Indeks Daya Saing Daerah
3. Mempermudah Pemerintah Daerah dalam penyampaian Laporan Indeks Daya Saing Daerahnya kepada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
4. Mempercepat dan memudahkan daerah untuk membuat record data setiap daerah yang melakukan pengisian Indeks Daya Saing Daerah
5. Membuat Database Indeks Daya Saing Daerah secara nasional

Berikut adalah proses yang dilakukan untuk melakukan pengisian kuesioner Indeks Daya Saing Daerah:

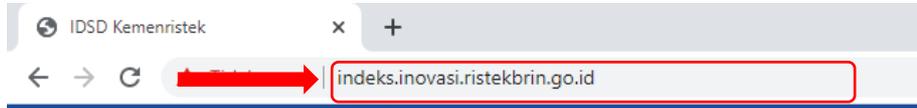
1. Akses WebSite Indeks Daya Saing Daerah

- Buka aplikasi browser seperti (Internet Explorer/Mozilla Firefox/Google Chrome) sesuai aplikasi browser yang tersedia.



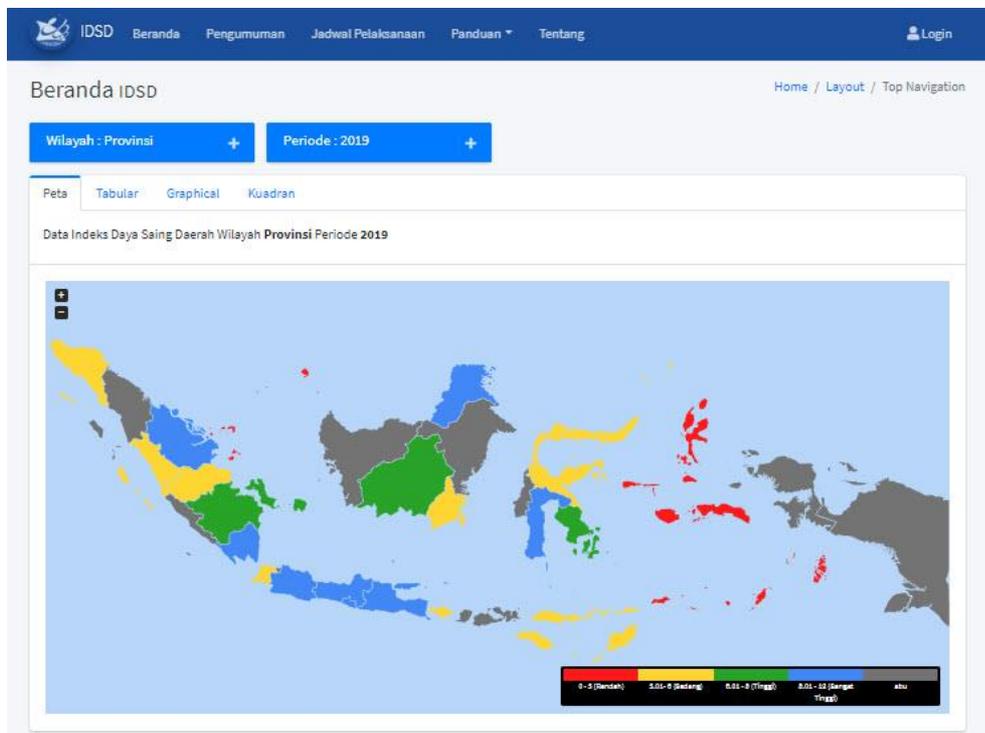
Gambar 4.1. Contoh Aplikasi Browser yang digunakan

- Ketik url website Indeks Daya Saing Daerah
“<http://indeks.inovasi.ristekbrin.go.id>”



Gambar 4.2. URL <http://indeks.inovasi.ristekbrin.go.id>

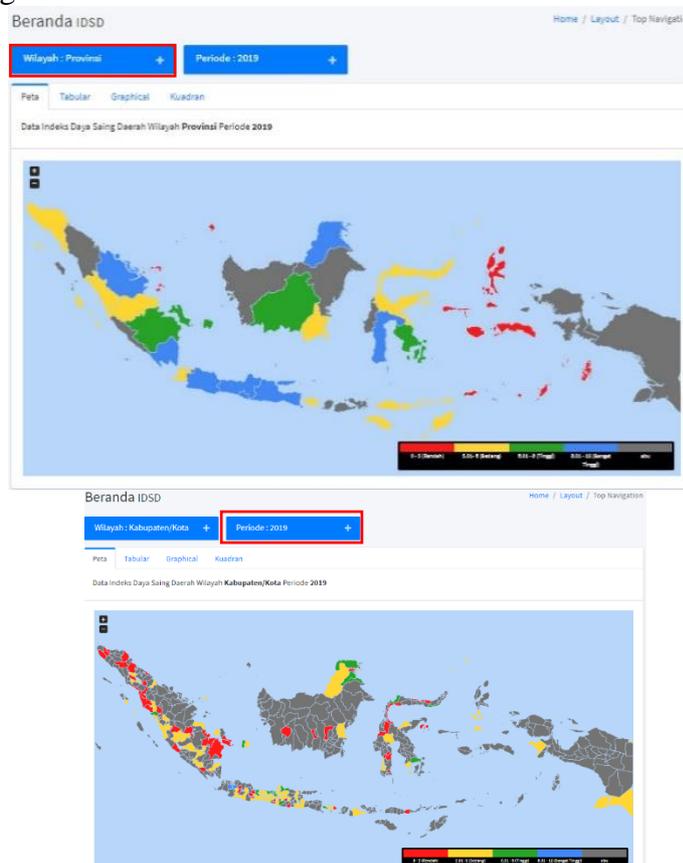
- Tampilan website IDSD secara default menampilkan peta dengan pembagian wilayah provinsi/kabupaten/kota, dengan beberapa menu yang dapat di akses, diantaranya;



Gambar 4.3. Tampilan Awal <http://indeks.inovasi.ristekbrin.go.id>

- Beranda: Merupakan halaman awal dari IDSD yang menampilkan Peta Indeks Daya Saing seluruh Indonesia
- Pengumuman: Menampilkan pengumuman-pengumuman yang disampaikan yang berkaitan dengan Indeks Daya Saing Daerah

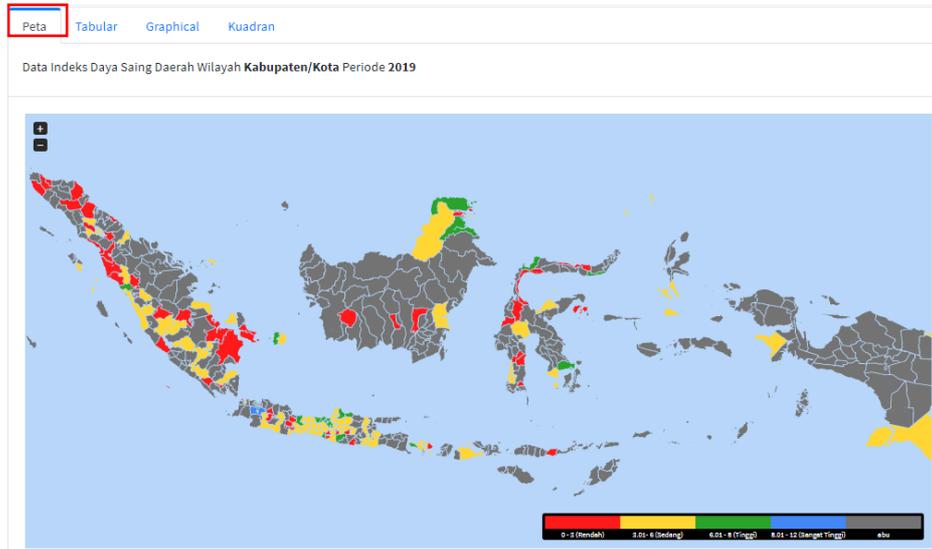
- Jadwal Pelaksanaan: Menampilkan Informasi Jadwal Pelaksanaan Indeks Daya Saing Daerah
- Panduan: Menampilkan Panduan Pengisian Indeks Daya Saing Daerah
- Tentang: Menampilkan Informasi Umum dari Indeks Daya Saing Daerah dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Login: Menu yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) untuk masuk kedalam sistem aplikasi pengisian Indeks Daya Saing Daerah
- Pada menu lanjutan terdapat pemilihan wilayah dan periode pengisian Indeks Daya Saing Daerah:



Gambar 4.4. Tampilan Beranda Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Peta Indeks Daya Saing Daerah

➤ Terdapat 4 menu tambahan lainnya yaitu:

a. Peta



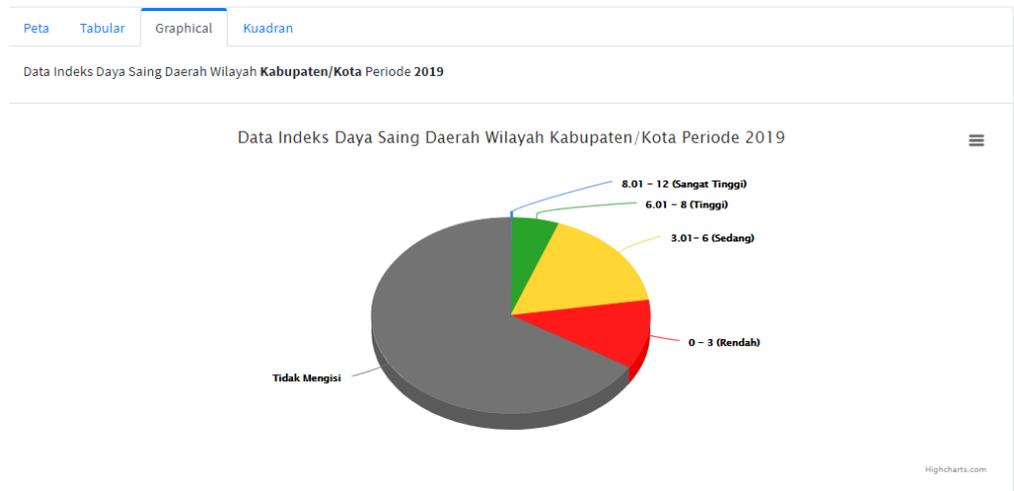
Gambar 4.5. Tampilan Beranda Peta Persebaran Indeks Daya Saing Daerah

b. Tabulasi, yang digunakan untuk melakukan pencarian data pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam bentuk table.

No	K.	Nama	Nilai	C...
1	1101	Kabupaten Simeulue		
2	1102	Kabupaten Aceh Singkil		
3	1103	Kabupaten Aceh Selatan		
4	1104	Kabupaten Aceh Tenggara		
5	1105	Kabupaten Aceh Timur	1.1783	
6	1106	Kabupaten Aceh Tengah		
7	1107	Kabupaten Aceh Barat		
8	1108	Kabupaten Aceh Besar		
9	1109	Kabupaten Pidie	2.5583	
10	1110	Kabupaten Bireuen		
11	1111	Kabupaten Aceh Utara		
12	1112	Kabupaten Aceh Barat Daya		
13	1113	Kabupaten Gayo Lues	0.6694	
14	1114	Kabupaten Aceh Tamiang		
15	1115	Kabupaten Nagan Raya		

Gambar 4.6. Tampilan Beranda Tabulasi Persebaran Indeks Daya Saing Daerah

- c. Graphical, menampilkan informasi data Indeks Daya Saing Daerah dalam bentuk grafis *pie chart*



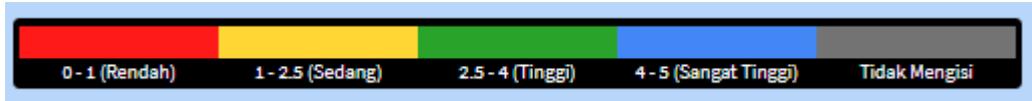
Gambar 4.7. Tampilan Graphical Persebaran Indeks Daya Saing Daerah

- d. Kuadran, menampilkan informasi posisi dari setiap aspek dari suatu daerah



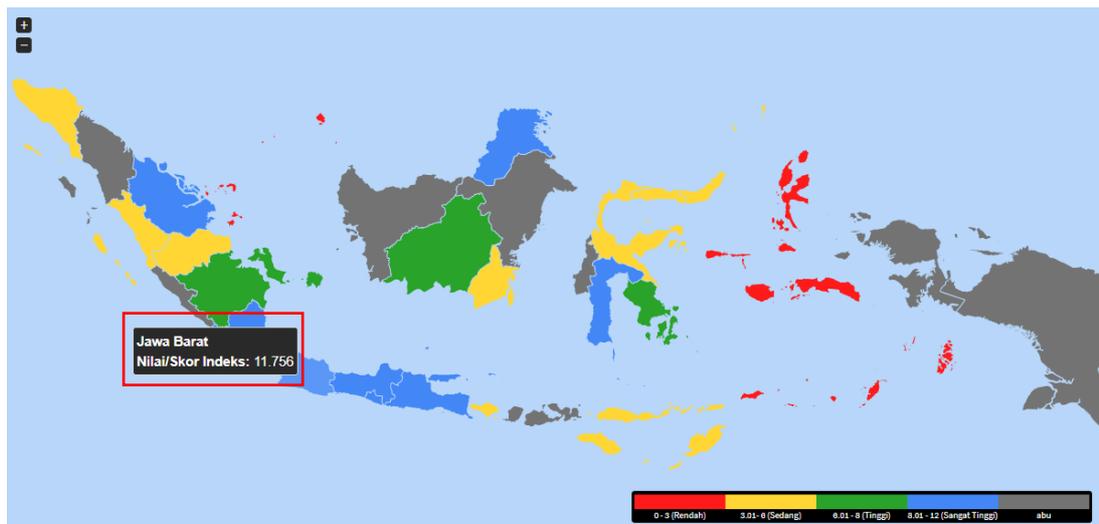
Gambar 4.8. Tampilan Kuadran Persebaran Indeks Daya Saing Daerah

- Kategori untuk Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020 dibagi menjadi 4, yang di gambarkan dengan warna yang berbeda.



Gambar 4.9. Kategori Indeks Daya Saing Daerah

- a. 0 - 1 Kategori “Sedang” menggunakan warna merah
 - b. 1 - 2.5 Kategori “Sedang” menggunakan warna kuning
 - c. 2.5 – 4 Kategori “Tinggi” menggunakan warna hijau
 - d. 4 – 5 Kategori “Sangat Tinggi” menggunakan warna biru
 - e. Jika tidak mengisi, memiliki warna abu-abu
- Data Indeks Daya Saing Daerah dapat di tampilkan dengan cara:
 - a. Menempatkan kursor pada peta daerah yang diinginkan



Gambar 4.10. Nilai Indeks Daya Saing Daerah

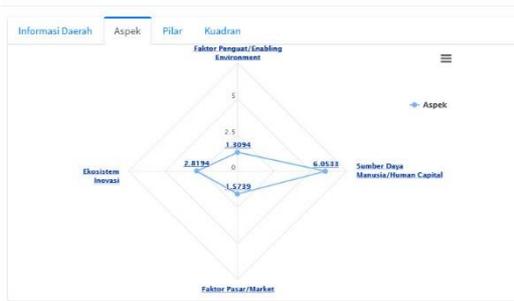
- b. Klik peta daerah yang diinginkan, untuk menampilkan data lebih detail. Data yang ditampilkan meliputi: Informasi Daerah, Logo, Tahun Pengisian IDSD, Skor IDSD, Skor Aspek, Pilar dan Dimensi beserta dengan bentuk Grafisnya. Data yang muncul tersebut dapat diakses dengan meng klik tab menu Aspek, Pilar dan Dimensi.

Informasi Indeks Data Saing Daerah JAWA BARAT

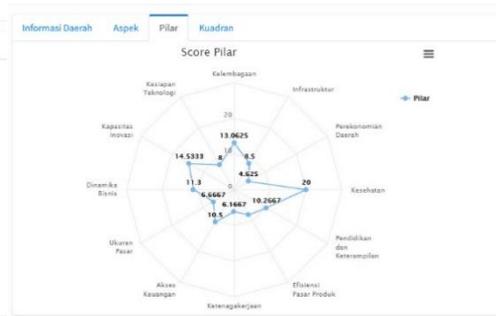
No.	Aspek	Nilai
1	Faktor Penguat/Enabling Environment	1.3094
2	Sumber Daya Manusia/Human Capital	6.0533
3	Faktor Pasar/Market	1.5739
4	Ekosistem Inovasi	2.8194

JAWA BARAT
Tahun
2019
Skor/Nilai Indeks
11.756

Informasi Indeks Data Saing Daerah JAWA BARAT



Informasi Indeks Data Saing Daerah JAWA BARAT

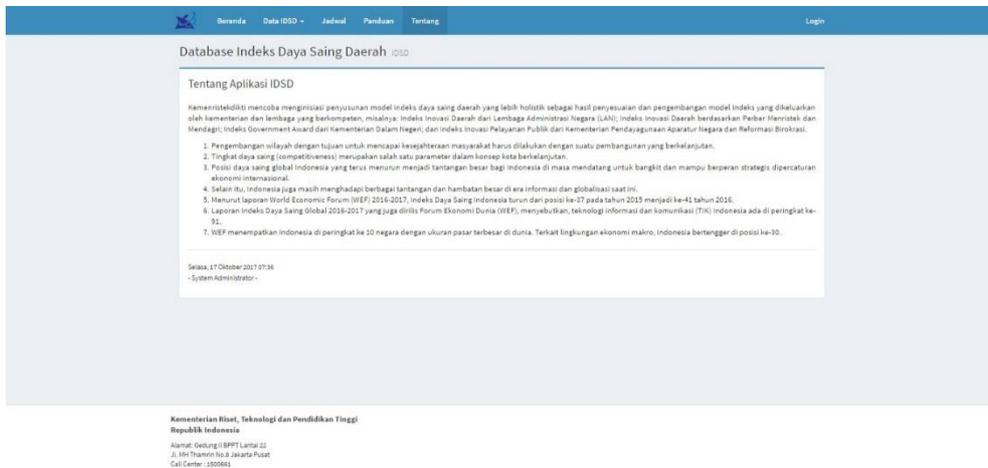


Gambar 4.11. Detail Indeks Daya Saing Daerah

- Klik menu jadwal untuk melihat informasi jadwal dan tahapan pengisian idsd

Gambar 4.12. Informasi Jadwal

- Klik menu panduan untuk donwload panduan pengisian idsdklik menu tentang untuk melihat informasi penjelasan tentang idsd



Gambar 4.13. Informasi Panduan

2. Login Indeks Daya Saing Daerah

Login IDSD dilakukan oleh daerah untuk melakukan pengisian kuesioner Indeks Daya Saing Daerah.

- Klik menu login yang berada di sudut kanan. Setelah mengakses <http://indeks.inovasi.ristekbrin.go.id/>.



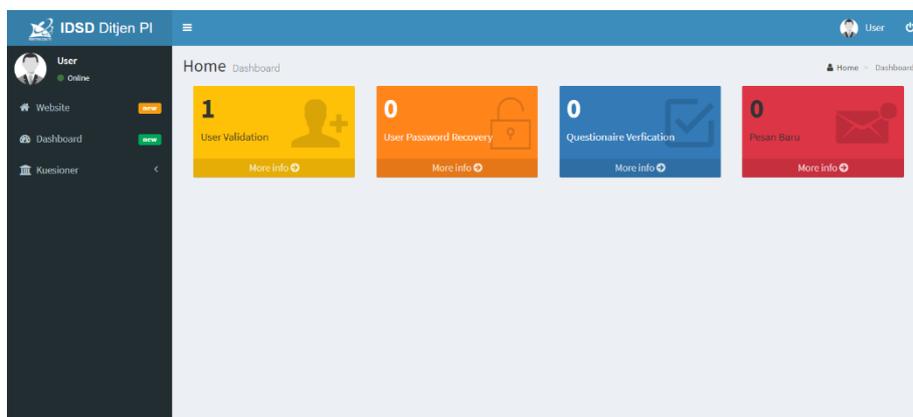
Gambar 4.14. Detail Indeks Daya Saing Daerah

- Tampilan menu login untu IDSD, isikan username pada kolom email dan password di isikan pada kolom password, setelah itu klik tombol “Login”

Gambar 4.15. Detail Indeks Daya Saing Daerah

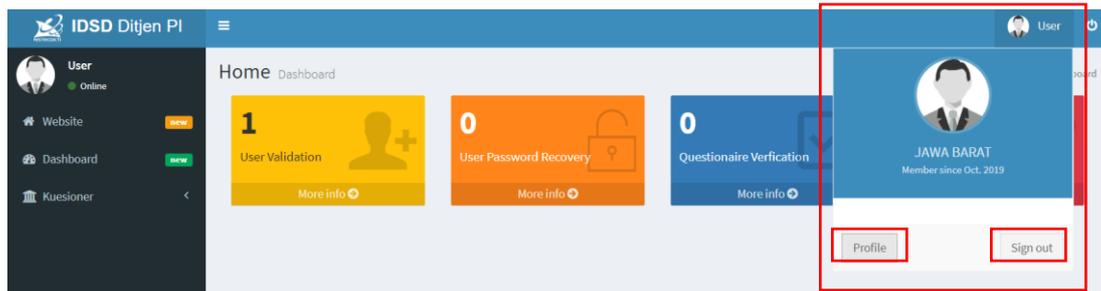
*Note : untuk mengetahui user name dan password bisa dilihat dilampiran

➤ Tampilan awal setelah Login.



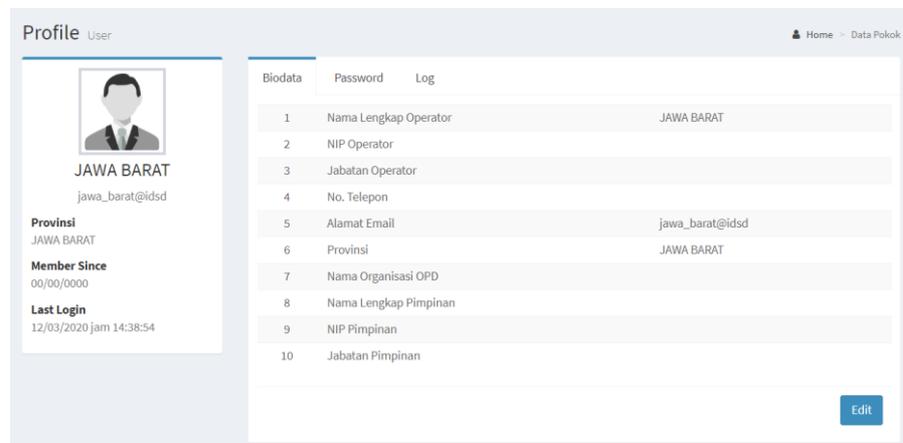
Gambar 4.16. Tampilan Awal Login

- Menu yang terdapat pada tampilan setelah login adalah:
- a. Menu User terdapat submenu yang menampilkan profil dan sign out



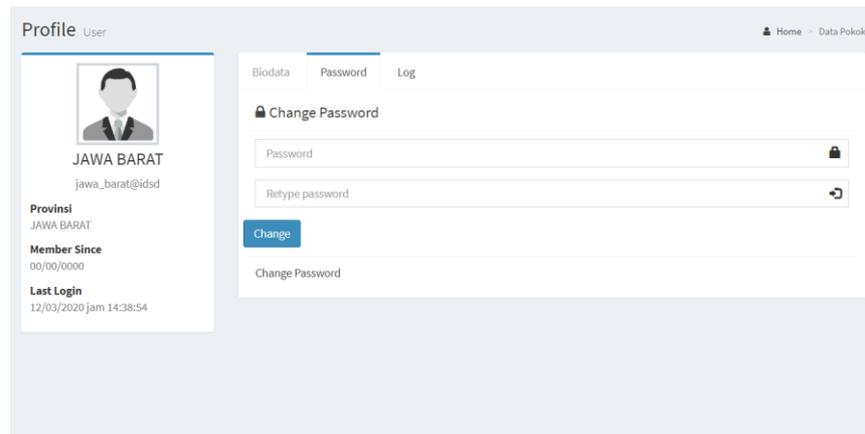
Gambar 4.17. Tampilan User

- Submenu Profil menampilkan profil dari user



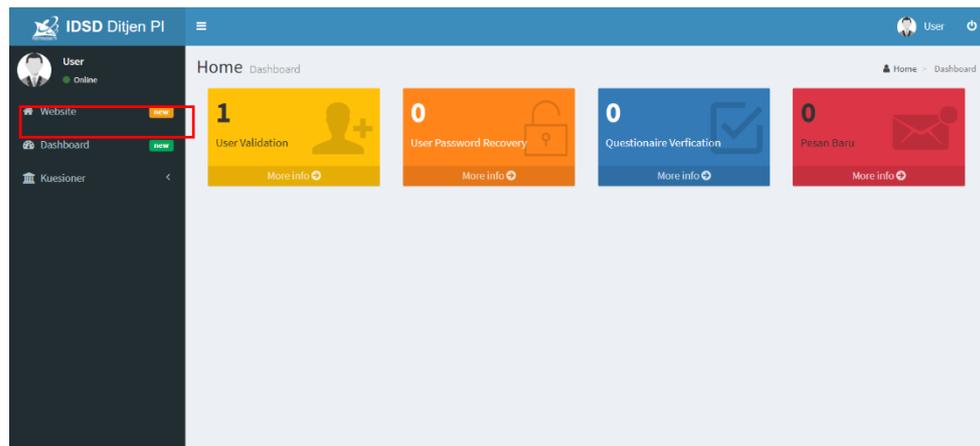
Gambar 4.18. Tampilan Profil

- Submenu Profil mengubah password



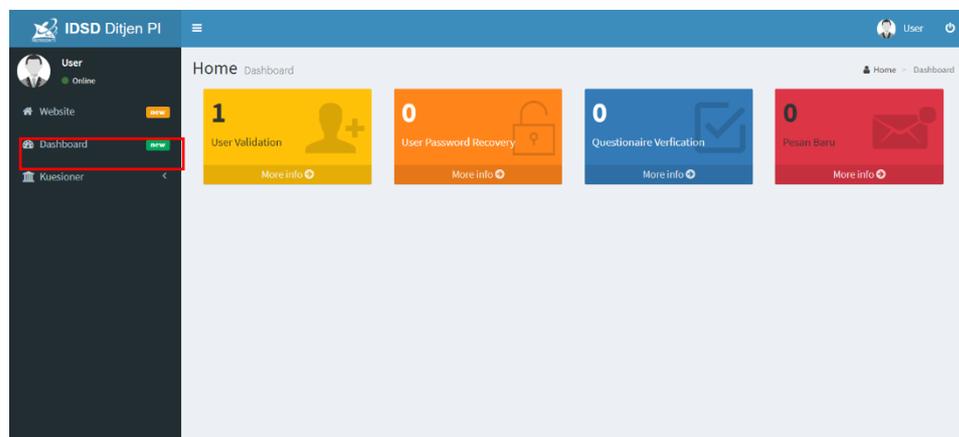
Gambar 4.19. Tampilan Change Password

- b. Menu Website yang digunakan untuk menampilkan tampilan utama website IDSD



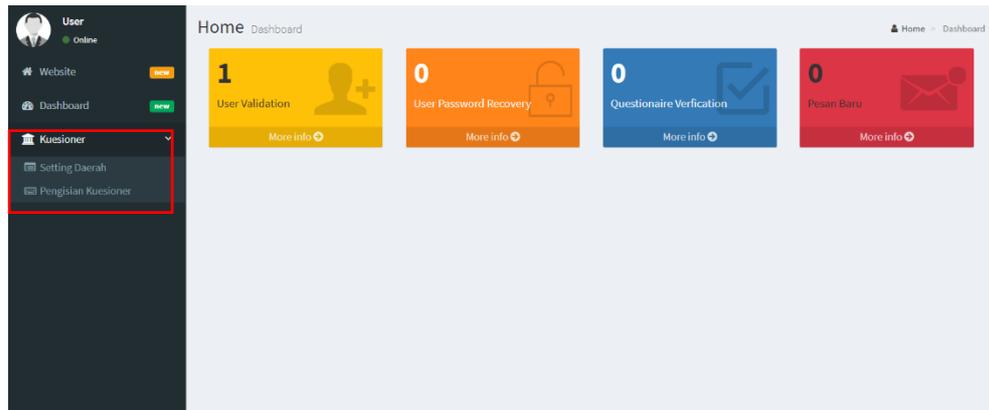
Gambar 4.20. Tampilan Menu Website

c. Menu Dashboard menampilkan dashboard



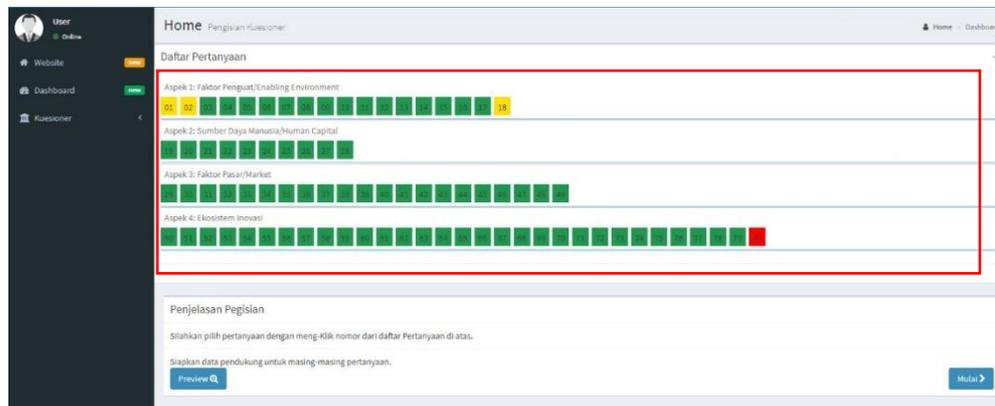
Gambar 4.21. Tampilan Menu Dashboard

d. Menu kuesioner, terdapat 2 submenu yaitu setting daerah dan pengisian kuesioner, setting daerah menampilkan nama daerah yang mengisi kuesioner dan pengisian kuesioner untuk menjawab kuesioner-kuesioner yang ditanyakan untuk IDSD.



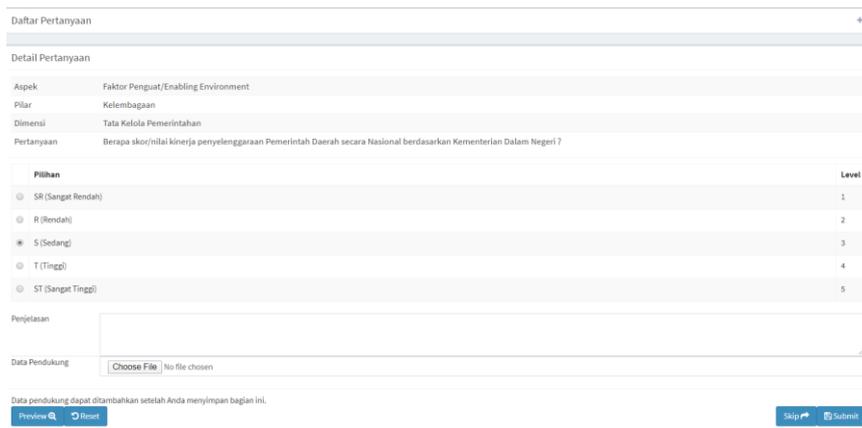
Gambar 4.22. Tampilan Menu Kuesioner

- Submenu pengisian Kuesioner, pada submenu pengisian kuesioner terdapat tampilan daftar pertanyaan,



Gambar 4.23. Tampilan Menu Pertanyaan Kuesioner

- Pertanyaan Kuesioner muncul ketika nomor pada Daftar Pertanyaan di klik, berikut adalah tampilan pertanyaan dari Kuesioner IDSD.



Gambar 4.24. Tampilan Pertanyaan Kuesioner

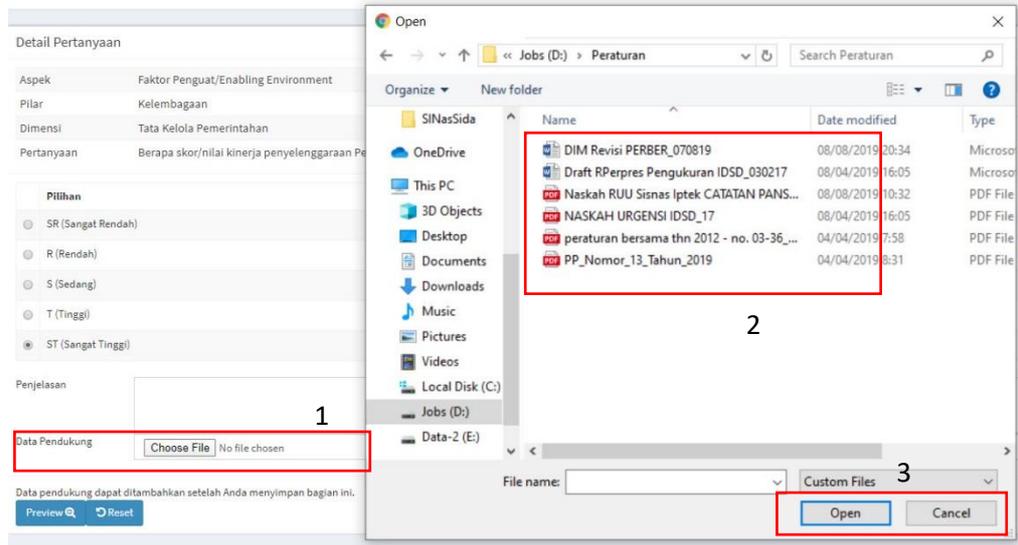
- Pada tampilan pertanyaan terdapat beberapa informasi yang di tampilkan.
 - i. Seperti Aspek, Pilar, Dimensi dan Pertanyaan Kuesioner sendiri sebagai Indikator pada IDSD,
 - ii. Pilihan Jawaban Pilihan Ganda dengan 5 Level jawaban,
 - iii. Field Penjelasan sebagai isian yang dapat di isi untuk menjelaskan dari hasil dari pilihan isian,
 - iv. Field Data Dukung yang digunakan untuk mengupload file pendukung dari setiap pertanyaan kuesioner berupa text, gambar, file dokumen atau link url sesuai dengan data pendukung yang dimiliki oleh daerah masing-masing.
 - v. Tombol Preview untuk melihat hasil isian,
 - vi. Tombol Reset untuk mereset isian kuesioner,
 - vii. Tombol Skip dapat digunakan untuk melewati pertanyaan yang belum bisa di isi,
 - viii. Tombol Submit yang digunakan untuk menyimpan hasil isian Kuesioner.
- Proses pengisian Kuesioner IDSD dapat dilakukan dengan mengklik jawaban berupa Radio Button pada setiap pilihan ganda, yang selanjutnya adalah mengisi penjelesan sebagai acuan, dan hal yang wajib di isi salah satunya adalah Data Dukung sebagai acuan untuk mempertanggung jawabkan hasil isian Kuesioner IDSD, dan selanjutnya adalah Klik Submit untuk menyimpan.

The screenshot displays a questionnaire interface with the following elements:

- Daftar Pertanyaan**: A list of questions.
- Detail Pertanyaan**: Metadata for the selected question, including Aspect (Faktor Penguat/Enabling Environment), Pilar (Kolombagaan), and Dimensi (Tata Kelola Pemerintahan).
- Pertanyaan**: The question text, labeled '1'.
- Pilihan**: A list of five radio button options labeled '2', corresponding to levels SR (Sangat Rendah), R (Rendah), S (Sedang), T (Tinggi), and ST (Sangat Tinggi). A 'Level' column on the right shows values 1 through 5.
- Penjelasan**: A text input field for providing an explanation, labeled '3'.
- Data Pendukung**: A file upload field with a 'Choose File' button and 'No file chosen' text, labeled '4'.
- Buttons**: 'Preview' and 'Reset' buttons are on the left, and 'Submit' is on the right, labeled '5'.

Gambar 4.25. Tampilan Pertanyaan Kuesioner

- Proses Upload Data Dukung dilakukan dengan Klik Choose File pada Field Data Dukung, selanjutnya akan muncul popup untuk memilih file yang akan di upload sesuai dengan pertanyaan Kuesioner.



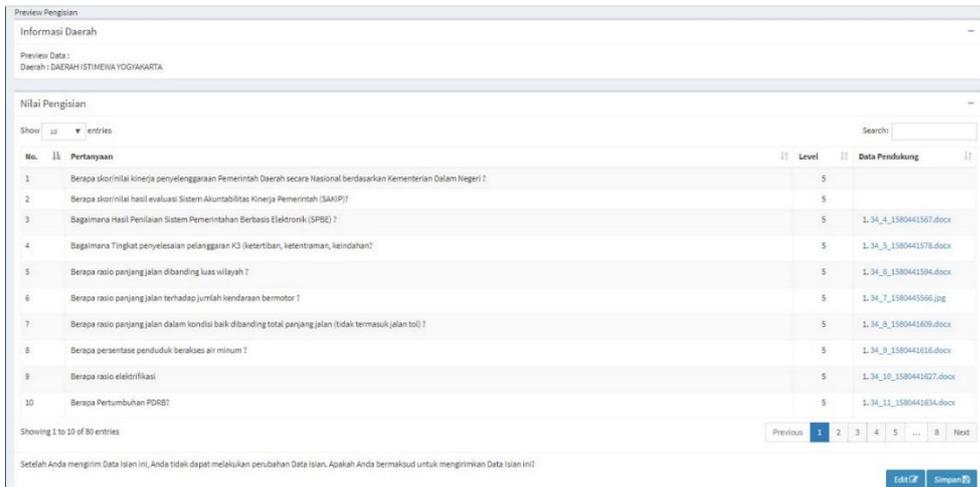
Gambar 4.26. Tampilan Upload Data Dukung

- Setiap jawaban kuisoner dan referensi data pendukung yang sudah disimpan bisa untuk dirubah kembali dengan cara membuka kembali jawaban kuisoner yang ingin dirubah jawaban atau referensi data pendukungnya selama masa waktu pengisian kuisoner yang sudah ditetapkan oleh Kemenristek/BRIN.
- Terdapat kode warna untuk membedakan pengisian Kuisioner
 - i. Warna merah pada nomor Kuesioner menandakan **Kuesioner Belum Diisi**
 - ii. Warna Kuning pada nomor Kuesioner menandakan **Kuesioner Sudah Diisi Namun Data Dukung Belum DiUpload**
 - iii. Warna Hijau pada nomor Kuesioner menandakan **Kuesioner dan Data Dukung Telah Diisi dengan lengkap**



Gambar 4.27. Perbedaan Warna Pengisian Kuesioner

- Hasil pengisian dapat di lihat dengan Klik preview untuk memberikan proses pengisian sudah selesai dilakukan oleh daerah untuk diperiksa kembali pengisiannya



The screenshot shows a web interface titled 'Preview Pengisian'. It includes a section for 'Informasi Daerah' with 'Preview Data : Daerah : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA'. Below this is a table titled 'Nilai Pengisian' with columns for 'No.', 'Pertanyaan', 'Level', and 'Data Pendukung'. The table lists 10 questions related to regional performance indicators, each with a level of 5 and a corresponding data file name.

No.	Pertanyaan	Level	Data Pendukung
1	Berapa skor/nilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional berdasarkan Kementerian Dalam Negeri ?	5	
2	Berapa skor/nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)?	5	
3	Bagaimana Hasil Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ?	5	1_34_4_1580441567.docx
4	Bagaimana Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketertarikan, keindahan)?	5	1_34_5_1580441578.docx
5	Berapa rasio panjang jalan dibanding luas wilayah ?	5	1_34_6_1580441594.docx
6	Berapa rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor ?	5	1_34_7_1580443586.jpg
7	Berapa rasio panjang jalan dalam kondisi baik dibanding total panjang jalan (tidak termasuk jalan tol) ?	5	1_34_8_1580441609.docx
8	Berapa persentase penduduk berakses air minum ?	5	1_34_9_1580441616.docx
9	Berapa rasio elektrifikasi	5	1_34_10_1580441627.docx
10	Berapa Pertumbuhan PDRB?	5	1_34_11_1580441634.docx

Gambar 4.28. Tampilan Prview Hasil Pengisian

➤ Hasil verifikasi

- Menu ini untuk melihat koreksi terhadap setiap jawaban kuisoner daerah dari pihak ristek dikti, termasuk catatan verifikasi dan tanggapan sanggahan daerah dari pihak ristek/brin
- Jika terdapat koreksi perubahan jawaban daerah dari pihak ristek/brin maka daerah berhak untuk memberikan sanggahan balik atau penjelasan terhadap perubahan jawaban kuisoner tersebut ke ristek dikti melalui proses sanggah yang sudah dibuat mekanismenya oleh ristek dikti, atau menerima koreksi terhadap perubahan jawaban kuisoner dari Kemenristek/BRIN tanpa proses sanggah dari daerah ke Kemenristek/BRIN

➤ Hasil penilaian

- Menu hasil penilaian menampilkan nilai idsd untuk daerah tersebut sesuai tahun penilaian nilai idsd daerah yang sudah ditetapkan oleh pihak Kemenristek/BRIN setelah daerah mengisi semua kuisoner idsd dan setelah masa verifikasi pihak Kemenristek/BRIN selesai
- Menampilkan detail nilai aspek idsd, nilai pilar idsd, nilai indikator idsd dan nilai atribut idsd untuk daerah

BAB 5.

ANALISIS DAN PEMBUATAN LAPORAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis di daerah maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya bersifat multisektoral dengan melibatkan banyak pelaku pembangunan sehingga diperlukan kerja sama dan koordinasi di antara semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi daerah dibutuhkan identifikasi terhadap kriteria evaluasi dan pengukuran daya saing yang tepat. Kemampuan mengidentifikasi potensi dan daya saing daerah mutlak diperlukan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan di daerah sebagai pijaka dalam menyediakan kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah.

Dalam rangka pengembangan potensi daerah di tengah lingkungan yang semakin dinamis, tentunya diperlukan berbagai upaya pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan.

Proses menuju kemandirian suatu daerah dalam era globalisasi saat ini tidaklah terlepas dari perlu adanya daya saing dalam membentuknya. Daya saing tidaklah hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja, tetapi lebih jauh lagi yaitu daya saing tersebut diartikan sebagai kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan

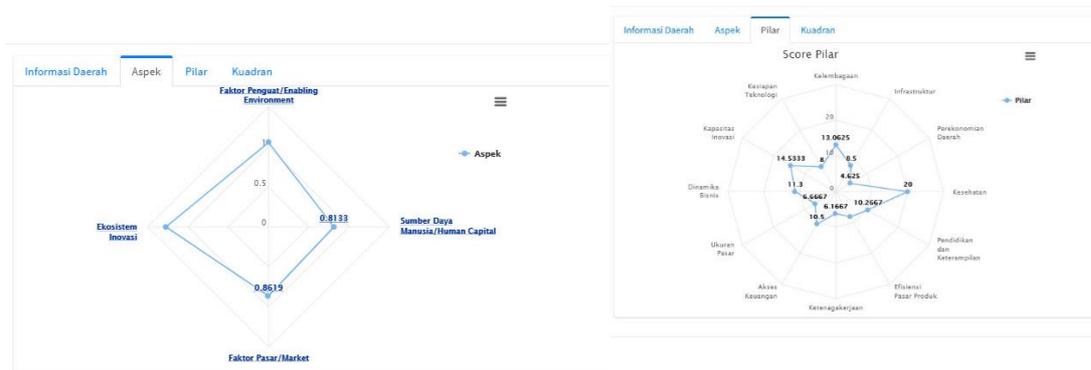
kesejahteraan hidup rakyat yang nyata dan berkelanjutan serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

5.1 Analisis Pemetaan IDSD

Capaian analisis pemetaan IDSD diperoleh dari empat aspek yaitu: 1) Aspek penguat/Enabling Environment; 2) Aspek Sumber Daya Manusia; 3) Aspek Pasar ;4) Aspek Ekosistem Inovasi. Ke empat aspek tersebut terbangun oleh 12 pilar, 23 dimensi dan 78 indikator/kuesioner. Hasil capaian skor IDSD menunjukkan indek daya saing daerah Pemerintah Daerah.

Perhitungan hasil pemetaan IDSD dengan variabel-variabelnya diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah daerah tentang pencapaian hasil indikator selama 1 tahun sebagai bahan evaluasi/ penilaian pencapaian daya saing daerah Pemerintah Daerah. Untuk memudahkan dapat melihat pencapaian hasil daya saing daerah, maka hasil pemetaan dapat disajikan dalam bentuk gambaran “grafik sarang laba-laba Fungsi Grafik ini adalah untuk menampilkan **data multivariat** diwakili sumbu mulai dari titik yang sama.

Adapun **tujuan grafik** yakni untuk menunjukkan perbandingan informasi yang kualitatif dengan cepat dan sederhana. Dan **kegunaan dari grafik** laba-laba adalah **kontrol dalam peningkatan kualitas** untuk menampilkan metrik kinerja dari setiap aspek yang sedang berlangsung, untuk **memetakan kekuatan** dan kelemahan, Selain itu, bisa digunakan dalam **menentukan tingkat daya saing** provinsi/kabupaten/kota di indonesia. Sehingga dengan grafik sarang laba-laba diharapkan pembaca lebih mudah mengetahui tingkat kesenjangan pencapaian dan ketidakserasian antara hasil aspek dengan pilar dan dimensi, karena antara keduanya mempunyai keterkaitan yang sejajar.



Gambar 5.1. Contoh Grafik Laba-laba

Analisis data merupakan kegiatan untuk mengambil kesimpulan dari data yang sudah diolah, yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan masukan bagi perencanaan, monitoring, dan pengendalian fungsi Pemerintah Daerah.

Kesalahan yang sering dilakukan dalam upaya menetapkan/merumuskan masalah secara benar, ada 3 buah hambatan :

1. Tidak mendiagnosa masalah dari gejalanya.
2. Terlalu memfokuskan pada masalah yang relatif kecil daripada masalah yang utama
3. Kurang dapat menentukan alternatif dalam penyelesaian masalah yang sebenarnya..

Langkah-langkah merumuskan masalah dan penyebabnya.:

1. Identifikasi kesenjangan pencapaian hasil pemetaan
2. Identifikasi faktor penyebab, pendukung, peluang dan ancaman prioritas masalah kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
3. Perumusan analisis sebab akibat, menggunakan suatu teknik untuk mengidentifikasi semua masalah dalam suatu situasi tertentu sebagai rangkaian hubungan sebab akibat.
4. Penentuan prioritas masalah kegiatan dari setiap aspek/pilar/dimensi dengan menggunakan metode, untuk menentukan urutan masalah dari yang paling penting sampai dengan yang kurang penting.

Selain dari hasil analisa pemetaan yang disajikan dalam bentuk gambaran “**grafik sarang laba-laba**”, juga bisa diperkaya juga dengan analisa deskriptif menggunakan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) biasa digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan di lingkungan bisnis maupun pada lingkungan internal perusahaan

Tabel 5.1. Matriks Analisis SWOT (Sumber: Kuncoro, 2005)

Faktor Eksternal	Faktor Internal	
	Strengths (S) (Daftar semua kekuatan yang dimiliki)	Weaknesses (W) (Daftar semua kelemahan yang dimiliki)
Opportunities (O) (Daftar semua peluang yang diidentifikasi)	Strategi SO: Growth	Strategi WO: Stability
Threats (T) (Daftar semua tantangan yang diidentifikasi)	Strategi ST: Diversification	Strategi WT: Defend

Berikut adalah contoh Perumusan Faktor Internal dan Faktor Eksternal dalam rangka pemilihan alternatif kebijakan peningkatan daya saing daerah.

Tabel 5.2 Perumusan Faktor Internal dan Faktor Eksternal

1	Faktor Internal
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Posisi geografis Wilayah 2) Kondisi topografi Wilayah yang bervariasi (dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah dengan susunan bebatuan yang berbeda-beda); 3) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia 4) Ketersediaan infrastruktur dasar; 5) Sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar dan kawasan ekonomi lainnya 6) Etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro; 7) Kapasitas dan kinerja kelembagaan 8) Potensi Sumber Daya Alam; 9) Tingkat partisipasi masyarakat; 10) Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan perundangan untuk mengoptimalkan potensi daerah; 11) Potensi pariwisata; 12) Pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah; 13) Upaya mensosialisasikan potensi daerah kepada pihak luar (swasta/investor); 14) Penentuan skala prioritas pembangunan; 15) Sistem birokrasi 16) Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD
2	Faktor Eksternal
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; 2) Undang-undang tentang Pajak dan Retribusi 3) Undang-undang tentang UMKM; 4) Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia; 5) Implementasi ASEAN Economic Community 6) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi internasional; 7) Kondisi sosial politik di tingkat nasional;

<ul style="list-style-type: none"> 8) Kondisi sosial politik di Wilayah 9) Berbagai program pemerintah pusat; 10) Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk anggaran 11) Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat; 12) Kemajuan tehnologi; 13) Berbagai kemajuan pembangunan yang dimiliki oleh daerah-daerah; 14) Investasi swasta di lingkungan Wilayah 15) Kerjasama dengan daerah-daerah sekitar Wilayah

Berdasarkan tabel diatas, maka faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal tersebut dapat dikategorikan menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dapat dijelaskan pada tabel Hasil Analisis SWOT berikut.

Tabel 5.3 Perumusan Faktor Internal dan Faktor Eksternal dalam SWOT

Kekuatan (Strength):	Peluang (Opportunity):
<ul style="list-style-type: none"> Posisi geografis Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Ketersediaan infrastruktur dasar Sarana dan prasarana perekonomian Etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro Potensi Sumber Daya Alam Potensi pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah Undang-undang tentang Pajak dan Retribusi Undang-undang tentang UMKM Kondisi sosial, politik, dan ekonomi internasional Kondisi sosial politik di Wilayah Berbagai program pemerintah pusat Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk anggaran Kemajuan teknologi Kerjasama dengan daerah-daerah sekitar wilayah
Kelemahan (Weakness):	Tantangan (Threat):
<ul style="list-style-type: none"> Kondisi topografi Kapasitas dan kinerja kelembagaan Tingkat partisipasi masyarakat Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan Perundangan Pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah Upaya mensosialisasikan potensi daerah Penentuan skala prioritas pembangunan Sistem birokrasi Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD 	<ul style="list-style-type: none"> Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia Implementasi ASEAN Economic Community Kondisi sosial politik di tingkat nasional Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat Berbagai kemajuan pembangunan yang dimiliki oleh daerah-daerah Investasi swasta

Dari konsep dan definisi mengenai daya saing tersebut, diketahui bahwa pada dasarnya daya saing daerah dihasilkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor input, output dan outcome yang ada di suatu daerah, dengan faktor input sebagai faktor utama pembentuk daya saing daerah yaitu kemampuan

daerah, yang selanjutnya akan menentukan kinerja output yang merupakan inti dari kinerja perekonomian.

Hasil analisa ini, untuk melihat bagaimana perkembangan daya saing daerah implikasinya terhadap produktivitas, keunggulan daerah dan pembangunan wilayah. dengan titik berat pada sektor unggulan, efisiensi, daya saing dan dapat menemukan konsep, strategi serta variabel yang dapat mendorong terjadinya peningkatan produktivitas, sektor unggulan, daya saing daerah input-output secara berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah, yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan masukan bagi perencanaan, monitoring, dan pengendalian fungsi Pemerintah Daerah.

5.2 Pembuatan Laporan Pemetaan IDSD

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah menganalisis data hasil penilaian IDSD serta membuat laporan secara tertulis. Berisi tentang hasil analisis dari pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dikaitkan dengan proses perencanaan pembangunan daerah dilengkapi dengan kelebihan dan kekurangan serta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Laporan tersebut berasal dari sumber data sekunder dan sumber data primer. Data sekunder adalah data-data yang berasal dari berbagai literatur kepustakaan, artikel dalam majalah, jurnal penelitian yang berkaitan, dan sumber media massa lainnya serta hasil penelitian terdahulu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian berasal dari data laporan tahunan dari pihak-pihak terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pusat Statistik, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ketenagakerjaan, Bagian Ekonomi, Bagian Data dan Statistik, Badan Penanaman Modal Daerah, serta instansi terkait. Data primer didapatkan langsung dilapangan melalui berbagai narasumber yang berkaitan seperti dari dinas maupun pelaku usaha. Data primer dikumpulkan melalui focus group discussion (FGD) di setiap pelaku ekonomi, yaitu pemerintah daerah, unit usaha, asosiasi usaha, serta lembaga-lembaga pendukung (lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga keuangan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga bantuan pengembangan bisnis).

Adapun sistematika laporan yang digunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut:

<p>HALAMAN SAMPUL</p> <p>SAMBUTAN KEPALA DAERAH</p>

KATA PENGANTAR KEPALA BAPPELITBANGDA KAB/KOTA

DAFTAR ISI/TABEL/GAMBAR

BAB I KEADAAN TERKINI

A. Identifikasi Peluang/Kendala & Inventarisasi Urgensi;

Berisi tentang gambaran umum daerah termasuk peluang dan kendala serta inventarisasi sektor prioritas/urgensi daerah.

B. Pemetaan Sektor Andalan (Matriks).

Berisi tentang mapping sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah dijelaskan dalam bentuk matriks.

BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

A. Formulasi Kebijakan melalui Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, Renstra, dll.);

Berisi tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan daya saing daerah.

B. *Extraordinary Strategy* melalui *Research-based Planning (RBP) & Planning-based Development (PBD)*;

Berisi tentang hasil analisis dari pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dikaitkan dengan proses perencanaan pembangunan daerah dilengkapi dengan kelebihan dan kekurangan serta berbagai faktor yang mempengaruhinya.

C. Kerangka Kebijakan Terintegrasi Penelitian.

Berisi tentang hasil pembahasan pengukuran IDSD disertai kebijakan dan rencana kebutuhan kegiatan penelitian/ pengembangan dalam rangka peningkatan daya saing daerah.

BAB III SOLUSI MENYELURUH

A. Agenda Kerjasama & Kolaborasi;

Berisi tentang analisis dan rekomendasi untuk perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kondisi pengukuran IDSD dalam bentuk berbagai

program yang bersifat lintas sektoral dan kolaboratif antar berbagai stakeholders terkait.

B. Resolusi Tahunan;

Berisi tentang berbagai langkah percepatan dalam bentuk berbagai program/ kegiatan dalam rangka peningkatan daya saing daerah.

C. Konektivitas Antarkelembagaan & Kewenangan Pemerintahan.

Berisi tentang strategi perencanaan pembangunan yang melibatkan sinkronisasi kewenangan antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kab/Kota serta konektivitas antar stakeholders terkait di daerah (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan lembaga lainnya).

BAB IV TATA KELOLA DAN DUKUNGAN

A. Agenda Kerja Tim Daya Saing Daerah melalui *Innovation Hub (I-hub)*;

Berisi tentang upaya meningkatkan kinerja tim peningkatan daya saing daerah lintas sektoral (tim Sistem Inovasi Daerah/SIDa) disertai dengan rencana kerja/ agenda kerja tahunan dalam rangka mendorong percepatan peningkatan daya saing daerah.

B. Anggaran, *Human Capital*, & Inovasi.

Berisi tentang optimalisasi anggaran pembangunan daerah melalui berbagai program/kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta upaya mendorong implementasi inovasi di berbagai sektor pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing daerah.

LAMPIRAN

Lampiran-Lampiran (dalam bentuk link alamat website, database, situs, dll)

Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam konsep daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Perbandingan dayasaing diperlukan untuk melihat dan

menjelaskan perbedaan tingkat kemakmuran daerah. Secara konsep, daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah harus mencari dan mengenal potensi yang akan dikembangkan dan dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. Apalagi dengan semakin terbukanya pasar bebas yang memungkinkan produk impor masuk ke daerah-daerah, tentunya usaha-usaha yang dilakukan daerah harus lebih nyata dan terukur. Ukuran keberhasilannya adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Setiap daerah dituntut untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat menciptakan ide-ide baru, perbaikan-perbaikan yang dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, industri baru, lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Berdasarkan Laporan Analisis Pemetaan IDSD, dilanjutkan dengan menyusun Rencana Aksi Daerah dengan menyelarakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam. Berikut adalah rekomendasi untuk perencanaan pembangunan daerah.

Faktor Penguat/ Enabling Environment	Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat, pelaku usaha dalam pengelolaan pembangunan daerah 3. Program penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
	Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah 2. Mendorong Percepatan Infrastruktur 3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik
	Perekonomian Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses keuangan dan pasar bagi UKM 2. Peningkatan nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 3. Meningkatkan persentase UMKM terhadap UKM
Sumber Daya Manusia/Human Capital	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan Persentase balita gizi buruk 2. Revitalisasi Sarana dan Tenaga Kesehatan (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Sanitasi). 3. Meningkatkan Upaya Deteksi Dini dan Pencegahan Penyakit. 4. Membangun PHBS Masyarakat Secara Partisipatif. 5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Lingkungan. Peningkatan Ketersediaan, Distribusi serta Konsumsi dan Keamanan Pangan. 6. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota Sehat
	Pendidikan	Meningkatkan APK khususnya APK Sekolah Menengah
	Keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja 2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Digital 4. Fasilitasi ketersediaan layanan akses informasi berbasis internet di perpustakaan desa/kelurahan; 5. Program peningkatan jumlah dan sebaran tenaga perpustakaan yang memiliki kompetensi
Faktor Pasar/Market	Efisiensi Pasar Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan konektivitas antar sentra produksi dan pasar 2. Program penguatan regulasi dan kelembagaan industri daerah 3. Program Peningkatan Kemampuan teknologi industri 4. Difusi Teknologi Peningkatan Daya Saing Produk 5. Unggulan Daerah Komoditas Ekspor
	Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka 2. Mengembangkan Industri Pengolahan (Manufaktur) untuk Hilirisasi SDA Unggulan dengan Memprioritaskan Penggunaan SebesarBesarnya Tenaga Kerja Lokal dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Resources)/ Bahan Baku Lokal. 3. Peningkatan Akses Angkatan Kerja Kepada melalui Peningkatan Keterampilan Pekerja. 4. Pengembangan Program Kemitraan Antara Pemerintah Provinsi dengan Dunia Industri untuk Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja. 5. Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Bagi Pekerja Rentan agar dapat Memasuki Pasar Kerja
	Akses Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan PAD 2. Meningkatkan Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3. Meningkatkan Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada Petani dan/atau Nelayan Ukuran Pasar

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Fasilitasi Keikutsertaan UKM untuk Promosi dalam Rangka Matchmaking dengan Perusahaan Skala Besar serta Pembinaan Kemitraan Usaha dengan Strategi Naik Kelas/Aliansi. 5. Membuka Wawasan para Usaha Mikro agar mendapat Akses Pembiayaan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). 6. Menambah Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro mengetahui kelengkapan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan modal dari perbankan
	Ukuran Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan persentase ekspor terhadap impor 2. Meningkatkan Pertumbuhan usaha industri besar 3. Revitalisasi Pasar Tradisional Menuju Pasar Tradisional Modern. 4. Meningkatkan Daya Saing Produk Industri Kecil dan Menengah. 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 6. Industri Kecil dan Menengah. 7. Memfasilitasi Standarisasi Produk Industri Kecil dan Menengah
Ekosistem Inovasi	Dinamika Bisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan iklim usaha 2. Meningkatkan Stabilitas keamanan 3. Perbaiki produk hasil industri kecil dan menengah Kapasitas 4. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi potensial, 5. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, 6. Mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi, selain pengembangan infrastruktur fisik juga akan dilakukan upaya-upaya meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi; dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan produknya melalui pendampingan yang memastikan adanya jaminan produk, keamanan, dan standar.
	Kapasitas Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran penelitian dan pengembangan 2. Pengembangan taman tekno dan taman sains, 3. Pengembangan pendidikan dan pelatihan berdasarkan potensi dan daya saing wilayah 4. Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan, 5. Menciptakan nilai tambah melalui inovasi-inovasi baru, 6. Menetapkan peraturan daerah dalam penguatan inovasi daerah
	Kesiapan Teknologi	Peningkatan intermediasi teknologi

BAB 6

STRATEGI KEBIJAKAN

PENINGKATAN DAYA SAING

6.1 Strategi Kebijakan

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis di daerah maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya bersifat multisektoral dengan melibatkan banyak pelaku pembangunan sehingga diperlukan kerja sama dan koordinasi di antara semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi daerah dibutuhkan identifikasi terhadap kriteria evaluasi dan pengukuran daya saing yang tepat. Kemampuan mengidentifikasi potensi dan daya saing daerah mutlak diperlukan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan di daerah sebagai pijakan dalam menyediakan kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah.

Pembangunan sarana dan prasarana, investasi dan akses terhadap sumber dana, kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumber daya manusia sudah seharusnya didasarkan pada keperluan untuk mengatasi gap daya saing yang masih dialami di berbagai daerah.

Dalam rangka pengembangan potensi daerah di tengah lingkungan yang semakin dinamis, tentunya diperlukan berbagai upaya pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan.

Proses menuju kemandirian suatu daerah dalam era globalisasi saat ini tidaklah terlepas dari perlu adanya daya saing dalam membentuknya. Daya saing tidaklah hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja, tetapi lebih jauh lagi yaitu daya saing tersebut diartikan sebagai kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup rakyat yang nyata dan berkelanjutan serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Perbandingan daya saing diperlukan untuk melihat dan menjelaskan perbedaan tingkat kemakmuran daerah. Secara konsep, daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah harus mencari dan mengenal potensi yang akan dikembangkan dan dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. Apalagi dengan semakin terbukanya pasar bebas yang memungkinkan produk impor masuk ke daerah-daerah, tentunya usaha-usaha yang dilakukan daerah harus lebih nyata dan terukur. Ukuran keberhasilannya adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Setiap daerah dituntut untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat menciptakan ide-ide baru, perbaikan-perbaikan yang dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, industri baru, lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Prioritas pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan membutuhkan dukungan tatakelola dan sinergi antara pusat dan daerah. Usaha untuk meningkatkan tatakelola dan sinergi pusat-daerah dapat dilakukan dengan membenahi kapabilitas pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia, pengembangan kualitas aparatur pemerintah daerah, pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan publik merupakan hal mendasar yang perlu menjadi perhatian pusat untuk meningkatkan daya saing daerah.

Dalam era globalisasi, penguatan daya saing semakin menentukan keunggulan posisional (position advantage) daerah dan sangat diperlukan dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi. Dalam perdagangan nasional maupun regional beragam hambatan tarif dan non tarif kini semakin bergeser untuk menggunakan hambatan teknis. Isu Hak Kekayaan Intelektual (HKI), standarisasi, sertifikasi, dan isu lingkungan sangat menentukan daya saing suatu daerah. Dalam pengertian tersebut, pembentukan daya saing tentu mencakup upaya untuk memperkuat sinergi berbagai sektor pembangunan daerah, juga mencakup penyempurnaan secara struktural dalam sistem pembangunan daerah agar pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih efektif dan efisien. Peran institusi pendidikan tinggi di daerah juga menjadi penting dalam meningkatkan kapabilitas pemerintah daerah, sehingga pendapatan asli daerah juga akan meningkat dengan bertahap. Satu hal yang dapat dikaji melalui penelitian institusi pendidikan tinggi adalah pemberdayaan potensi daerah, selain itu pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) daerah dalam memasarkan produknya, karena banyak sekali hasil produksi UMKM dari berbagai daerah yang masih belum dapat menembus pasar ekspor dengan kendala keterbatasan informasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Saat ini konsep klaster sebagai suatu pendekatan kebijakan baru dalam pengembangan wilayah telah semakin luas digunakan di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang, terutama dikaitkan dengan kesiapan suatu wilayah meningkatkan daya saingnya dalam menghadapi regionalisasi dan globalisasi.

Klaster secara signifikan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah untuk membangun kekayaan masyarakat. Klaster mampu bertindak sebagai pendorong inovasi, dimana keberadaan unsur-unsur dalam klaster diperlukan untuk mengubah gagasan menjadi kenyataan. Unsur universitas atau pusat riset merupakan tulang punggung dalam menciptakan berbagai temuan baru yang kemudian ditransformasikan oleh perusahaan ke dalam berbagai produk atau jasa baru. Unsur pemasok menyediakan perlengkapan atau komponen penting. Unsur perusahaan pemasaran dan distribusi membawa produk itu ke pelanggan. Hasilnya adalah kawasan dengan klaster yang tumbuh dan bekerja dengan baik akan menikmati upah, produktivitas, pertumbuhan usaha, dan inovasi yang lebih tinggi. Kajian lebih lanjut mengenai pengembangan klaster di Indonesia sangat diperlukan untuk mendalami fenomena

terbentuknya klaster-klaster tersebut dan menemukan upaya-upaya pengembangan yang dapat serta perlu dilakukan.

Ke depan, dalam rangka membangun daya saing daerah, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa hal, antara lain: (a) Memetakan potensi daerah berikut supply dan demand, (b) Memperkuat seluruh infrastruktur ekonomi untuk mendorong potensi daerah, termasuk SDM-nya, (c) Menguasai rantai pasokan (hulu-hilir) untuk menekan inefisiensi (sinergi provinsi dan kabupaten /kota), (d) Menciptakan inovasi produk, serta (e) Mendorong ekonomi rakyat dengan terus meningkatkan penggunaan produksi lokal. Akhirnya, kesiapan kapabilitas pemerintah daerah perlu didukung oleh peningkatan kemampuan dalam mengelola keuangan daerahnya. Kualitas sumber daya manusia perlu dipersiapkan, sehingga dana yang dimiliki dapat dikelola dengan efektif dan secara bertahap dapat membangun daya saing pemerintah daerah di Indonesia.

Untuk Peningkatan Daya Saing guna Peningkatan efisiensi nasional dan daerah melalui Program **Penguatan Efisiensi Melalui Kelembagaan** melalui kebijakan Meningkatkan efisiensi nasional dan daerah melalui strategi Membangun Kawasan Ekonomi Khusus atas dasar potensi dan keunggulan daerah, Mengembangkan efisiensi perekonomian nasional dan daerah dengan melakukan pengawasan birokrasi disertai dengan penegakan hukum yang tegas, Menetapkan perda-perda yang berorientasi pada pencapaian efisiensi nasional dan daerah Dalam menjalankan bisnis dan tingkat daya saing ekonomi. Masalah pemberdayaan kelembagaan birokrasi tampaknya memang menjadi soal sangat serius. Dalam upaya menciptakan efektif dan efisiensi birokrasi seyogyanya menjadi upaya bersama untuk diwujudkan percepatannya.

Pemerintah daerah seyogyanya mengubah paradigma penggalan pendapatan daerah yang bersumber dari pungutan daerah, serta menjadikan pemodal atau investor yang akan menanamkan modalnya di daerah sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan yang baik.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk basis inovasi di kelembagaan pemerintahan daerah juga perlu dilakukan karena arah birokrasi ke depan adalah otomasi atau bahkan digitalisasi yang akan makin mengefisienkan roda birokrasi.

Dari sisi SDM, perlu terus diupayakan membangun meritokrasi sistem staffing birokrasi, melalui implementasi open recruitment, dengan open recruitment, diharapkan akan didapatkan calon-calon yang kapabel untuk memegang jabatan tertentu. Menata ulang kelembagaan dan SDM birokrasi seyogyanya menjadi prioritas pada semua tataran birokrasi, mengingat semakin ketatnya persaingan ekonomi kawasan pada masa mendatang.

Transformasi jiwa-jiwa entrepreneurship kedalam birokrasi dapat menjadi alternatif solusi dalam menjawab tantangan tersebut, mewirausahakan birokrasi sejatinya adalah sebuah usaha reformasi birokrasi dari aspek sumber daya manusia, yang dapat dilakukan paralel dengan usaha untuk mereformasi birokrasi dari aspek sistem dan kelembagaan birokrasi yang ada. Sikap-sikap mental yang positif dari jiwa-jiwa entrepreneurship seyogyanya dapat menjadi sebuah daya yang besar dalam mengoptimalkan kinerja birokrasi dalam mengembangkan investasi, mengatasi masalah ketenagakerjaan, pembangunan infrastruktur dan mengembangkan ekonomi kreatif.

Optimalisasi kinerja birokrasi sangat dibutuhkan dalam memenangkan kompetisi yang terjadi di segala lini dari mulai persaingan mendapatkan investasi, kualitas dan harga jual produk ekspor, pasar tenaga kerja, kualitas infrastruktur, hingga regulasi yang pro-investasi. Harapannya dengan mentransformasi spirit kewirausahaan dalam birokrasi akan dapat semakin meningkatkan kinerja birokrasi dalam memperkuat daya saing, sehingga dapat mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat.

BAB 7 PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Indeks daya saing dapat digunakan sebagai potret atau alat ukur keberhasilan pembangunan sebuah daerah secara luas. Indeks ini juga dapat digunakan sebagai alat ukur tingkat kesejahteraan penduduk dan merupakan potret pembangunan sebuah daerah. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sangat penting dilakukan. Mengapa? Karena pengukuran Indeks Daya Saing Daerah bertujuan menginformasikan sebuah seri struktur dialog multi-stakeholder yang dapat meningkatkan kewaspadaan untuk mendorong transformasi sebuah negara, region, atau kota untuk menolong mereka menjadi lebih berdaya saing, dengan menawarkan serta memberi ruang pada kesempatan untuk meningkatkan kemakmuran.

Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah sangat perlu dilakukan guna memberi arah dan peta jalan (road map) bagi para politisi dan semua pemangku kepentingan daerah agar dapat menetapkan strategi pembangunan daerah.

Indeks Daya Saing Daerah perlu dikembangkan dan dikelola agar Pemimpin Tertinggi Negara (Presiden) dalam melihat dengan mudah progres perkembangan, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kesempatan kerja, dan kesejahteraan daerah. Indeks Daya Saing dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan sebuah daerah mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah tersebut.

Penyusunan model pengukuran indeks daya saing daerah yang dibangun berdasarkan pilar, dimensi dan indikator secara global. Regulasi yang sesuai dengan pengukuran indeks daya saing di daerah adalah Peraturan Presiden (Perpres) karena melibatkan semua kementerian dan lembaga yang terkait. Bahwa untuk mendukung sistem pengukuran indeks daya saing di daerah dibutuhkan penyusunan Database dan Program Sistem Aplikasi Indeks Daya Saing Daerah.

Dalam rangka operasionalisasi pengukuran indeks daya saing daerah, diperlukan panduan pengukuran indeks daya saing daerah yang dibangun berdasarkan kewenangan kelembagaan, mekanisme pengukuran (kuesioner online), serta evaluasi dan pengendalian (reporting).

DAFTAR BACAAN

- Abdullah, Petter. *Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, 2002
- Direktorat Sistem Inovasi Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, 2017. *Naskah Urgensi Indeks Daya Saing Daerah*
- Direktorat Sistem Inovasi Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, 2018. *Laporan Hasil Pemetaan Pengembangan Sistem Informasi Indeks Daya Saing Daerah Dan Data Inovasi*
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2013.** *Membangun Daya Saing Daerah*, <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/22-membangun-daya-saing-daerah>, diakses 5 November jam 11.02
- Eddy Cahyono, 2014. *Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Peran Birokrasi*,: <https://setkab.go.id/peningkatan-daya-saing-ekonomi-dan-peran-birokrasi/> diakses 5 November jam 11.53
- IMD World Competitiveness Rankings 2018 Results <https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2018/>, diakses 25 Oktober jam 10.55
- The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019 results, <https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019/>, diakses 25 Oktober jam 11.15
- Kajian atas kebijakan penguatan daya saing daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Keuangan, Direktorat Jendral Pengembangan Keuangan
- Martin, R., Kitson, M., & Tyler, P. (Eds.). (2003). *Regional competitiveness*. Routledge.
- Tarigan, S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara.
- Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia dan Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. (2008). *Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Kota di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Teori Stufenbau, https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau, diakses 25 Oktober jam 8.57

No	Kode	Nama	username/email	password
478	7601	Kabupaten Majene	kab_majene@idsd	idsd2020
479	7602	Kabupaten Polewali Mandar	kab_polewali_mandar@idsd	idsd2020
480	7603	Kabupaten Mamasa	kab_mamasa@idsd	idsd2020
481	7604	Kabupaten Mamuju	kab_mamuju@idsd	idsd2020
482	7605	Kabupaten Mamuju Utara	kab_mamuju_utara@idsd	idsd2020
483	7606	Kabupaten Mamuju Tengah	kab_mamuju_tengah@idsd	idsd2020
484	81	MALUKU	maluku@idsd	idsd2020
485	8101	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	kab_maluku_tenggara_barat@idsd	idsd2020
486	8102	Kabupaten Maluku Tenggara	kab_maluku_tenggara@idsd	idsd2020
487	8103	Kabupaten Maluku Tengah	kab_maluku_tengah@idsd	idsd2020
488	8104	Kabupaten Buru	kab_buru@idsd	idsd2020
489	8105	Kabupaten Kepulauan Aru	kab_kepulauan_aru@idsd	idsd2020
490	8106	Kabupaten Seram Bagian Barat	kab_seram_bagian_barat@idsd	idsd2020
491	8107	Kabupaten Seram Bagian Timur	kab_seram_bagian_timur@idsd	idsd2020
492	8108	Kabupaten Maluku Barat Daya	kab_maluku_barat_daya@idsd	idsd2020
493	8109	Kabupaten Buru Selatan	kab_buru_selatan@idsd	idsd2020
494	8171	Kota Ambon	kota_ambon@idsd	idsd2020
495	8172	Kota Tual	kota_tual@idsd	idsd2020
496	82	MALUKU UTARA	maluku_utara@idsd	idsd2020
497	8201	Kabupaten Halmahera Barat	kab_halmahera_barat@idsd	idsd2020
498	8202	Kabupaten Halmahera Tengah	kab_halmahera_tengah@idsd	idsd2020
499	8203	Kabupaten Kepulauan Sula	kab_kepulauan_sula@idsd	idsd2020
500	8204	Kabupaten Halmahera Selatan	kab_halmahera_selatan@idsd	idsd2020
501	8205	Kabupaten Halmahera Utara	kab_halmahera_utara@idsd	idsd2020
502	8206	Kabupaten Halmahera Timur	kab_halmahera_timur@idsd	idsd2020
503	8207	Kabupaten Pulau Morotai	kab_pulau_morotai@idsd	idsd2020
504	8208	Kabupaten Pulau Taliabu	kab_pulau_taliabu@idsd	idsd2020
505	8271	Kota Ternate	kota_ternate@idsd	idsd2020
506	8272	Kota Tidore Kepulauan	kota_tidore_kepulauan@idsd	idsd2020
507	91	PAPUA BARAT	papua_barat@idsd	idsd2020
508	9101	Kabupaten Fakfak	kab_fakfak@idsd	idsd2020
509	9102	Kabupaten Kaimana	kab_kaimana@idsd	idsd2020
510	9103	Kabupaten Teluk Wondama	kab_teluk_wondama@idsd	idsd2020
511	9104	Kabupaten Teluk Bintuni	kab_teluk_bintuni@idsd	idsd2020
512	9105	Kabupaten Manokwari	kab_manokwari@idsd	idsd2020
513	9106	Kabupaten Sorong Selatan	kab_sorong_selatan@idsd	idsd2020
514	9107	Kabupaten Sorong	kab_sorong@idsd	idsd2020
515	9108	Kabupaten Raja Ampat	kab_raja_ampat@idsd	idsd2020
516	9109	Kabupaten Tambrauw	kab_tambrauw@idsd	idsd2020
517	9110	Kabupaten Maybrat	kab_maybrat@idsd	idsd2020
518	9111	Kabupaten Manokwari Selatan	kab_manokwari_selatan@idsd	idsd2020

No	Kode	Nama	username/email	password
519	9112	Kabupaten Pegunungan Arfak	kab_pegunungan_arfak@idsd	idsd2020
520	9171	Kota Sorong	kota_sorong@idsd	idsd2020
521	94	PAPUA	papua@idsd	idsd2020
522	9401	Kabupaten Merauke	kab_merauke@idsd	idsd2020
523	9402	Kabupaten Jayawijaya	kab_jayawijaya@idsd	idsd2020
524	9403	Kabupaten Jayapura	kab_jayapura@idsd	idsd2020
525	9404	Kabupaten Nabire	kab_nabire@idsd	idsd2020
526	9408	Kabupaten Kepulauan Yapen	kab_kepulauan_yapen@idsd	idsd2020
527	9409	Kabupaten Biak Numfor	kab_biak_numfor@idsd	idsd2020
528	9410	Kabupaten Paniai	kab_paniai@idsd	idsd2020
529	9411	Kabupaten Puncak Jaya	kab_puncak_jaya@idsd	idsd2020
530	9412	Kabupaten Mimika	kab_mimika@idsd	idsd2020
531	9413	Kabupaten Boven Digoel	kab_boven_digoel@idsd	idsd2020
532	9414	Kabupaten Mappi	kab_mappi@idsd	idsd2020
533	9415	Kabupaten Asmat	kab_asmat@idsd	idsd2020
534	9416	Kabupaten Yahukimo	kab_yahukimo@idsd	idsd2020
535	9417	Kabupaten Pegunungan Bintang	kab_pegunungan_bintang@idsd	idsd2020
536	9418	Kabupaten Tolikara	kab_tolikara@idsd	idsd2020
537	9419	Kabupaten Sarmi	kab_sarmi@idsd	idsd2020
538	9420	Kabupaten Keerom	kab_keerom@idsd	idsd2020
539	9426	Kabupaten Waropen	kab_waropen@idsd	idsd2020
540	9427	Kabupaten Supiori	kab_supiori@idsd	idsd2020
541	9428	Kabupaten Mamberamo Raya	kab_mamberamo_raya@idsd	idsd2020
542	9429	Kabupaten Nduga	kab_nduga@idsd	idsd2020
543	9430	Kabupaten Lanny Jaya	kab_lanny_jaya@idsd	idsd2020
544	9431	Kabupaten Mamberamo Tengah	kab_mamberamo_tengah@idsd	idsd2020
545	9432	Kabupaten Yalimo	kab_yalimo@idsd	idsd2020
546	9433	Kabupaten Puncak	kab_puncak@idsd	idsd2020
547	9434	Kabupaten Dogiyai	kab_dogiyai@idsd	idsd2020
548	9435	Kabupaten Intan Jaya	kab_intan_jaya@idsd	idsd2020
549	9436	Kabupaten Deiyai	kab_deiyai@idsd	idsd2020
550	9471	Kota Jayapura	kota_jayapura@idsd	idsd2020